



**Kementerian
Perindustrian**
REPUBLIK INDONESIA

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
DIREKTORAT PENGEMBANGAN FASILITASI
INDUSTRI WILAYAH II
TAHUN 2015**

**DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN INDUSTRI
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN**

Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53 Jakarta 12950

Kata Pengantar

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmatNya Direktorat Pengembangan Fasilitas industri Wilayah II dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015.

Dasar hukum penyusunan LAKIP diantaranya adalah Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Permen PAN dan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Perindustrian No 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

Laporan ini merupakan pertanggungjawaban Direktorat Pengembangan Fasilitas industri Wilayah II atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam membantu Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/ 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian.

Dengan dukungan alokasi anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2015 telah dilaksanakan berbagai program pembangunan guna merealisasikan target-target pengembangan perwilayahan di Jawa dan Bali sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri dan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Pengembangan Fasilitas industri Wilayah II.

Melalui LAKIP ini, kami berharap dapat memberikan gambaran obyektif tentang kinerja Direktorat Pengembangan Fasilitas industri Wilayah II tahun 2015, selain itu laporan ini diharapkan juga dapat menjadi acuan yang berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pada tahun mendatang.

Kepada semua pihak yang telah terlibat dalam proses penyusunan laporan ini, baik dalam bentuk kontribusi data, kontribusi penulisan laporan, maupun bentuk kontribusi lainnya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Jakarta, Januari 2016

Direktur Pengembangan Fasilitas
Industri Wilayah II

Budhi Setyanto

IKHTISAR EKSEKUTIF

LAKIP Direktorat Pengembangan Fasilitas Industri Wilayah II Tahun 2015 disusun sebagai akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Rencana Strategis (Renstra) menetapkan sasaran yang menjadi Indikator Kinerja Kunci bagi Direktorat Pengembangan Fasilitas Industri Wilayah II pada tahun tertentu. Sasaran tersebut mempunyai target masing-masing, dimana pelaksanaannya didukung oleh anggaran yang tersedia di dalam DIPA.

Total jumlah DIPA yang diterima oleh Direktorat Pengembangan Fasilitas Industri Wilayah II untuk tahun anggaran 2015 adalah sebesar Rp 19.750.000.000,-. Dari total dana tersebut telah berhasil direalisasikan sebesar Rp 17.229.624.005,- (87,24 %).

Berdasarkan Pengukuran Kinerja yang dilaksanakan, rata-rata nilai capaian kinerja adalah sebesar 106,36 %. Nilai capaian tersebut telah menunjukkan bahwa program kerja Direktorat Pengembangan Fasilitas Industri Wilayah II telah dilaksanakan sesuai dengan sasaran dan capaian IKU sesuai target yang ditetapkan.

Untuk meningkatkan kinerja dalam mendukung sasaran yang telah ditetapkan dan pelayanan bagi stakeholder terkait, perlu kiranya dilakukan perbaikan terutama melakukan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Direktorat Pengembangan Fasilitas Industri Wilayah II.

Dari sisi keuangan diharapkan pula adanya pembenahan dalam upaya pencairan dana yang selama ini mengalami berbagai hambatan serta bagi penanggung jawab kegiatan lebih meningkatkan pertanggungjawaban kegiatan yang telah dilaksanakan.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi	1
B. Struktur Organisasi	1
C. Latar Belakang Kegiatan/Program	2

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis Direktorat Pengembangan Fasilitas Industri Wilayah II	4
1. Visi dan Misi.....	4
2. Tujuan dan Sasaran.....	5
3. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat PFI Wilayah II.....	6
B. Rencana Kinerja	10
1. Sasaran.....	10
2. Indikator Kinerja Utama	11
C. Rencana Anggaran	14

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Analisis Capaian Kinerja	17
B. Akuntabilitas Keuangan	57

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	60
B. Saran	61

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daerah-daerah yang ditetapkan sebagai WPPI	7
Tabel 2. Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis Dit. PFI Wilayah II Tahun 2015	12
Tabel 3. Program Kegiatan Direktorat Pengembangan Fasilitas Industri Wilayah II Tahun 2015	15
Tabel 4. Capaian IKU I dari Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri di Wilayah Jawa dan Bali	18
Tabel 5. Capaian IKU II dari Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri di Wilayah Jawa dan Bali.....	19
Tabel 6. Capaian IKU III dari Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri di Wilayah Jawa dan Bali.....	20
Tabel 7. Capaian IKU IV dari Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri di Wilayah Jawa dan Bali.....	21
Tabel 8. Jumlah industri Pengolahan Besar dan Sedang, Jawa dan Luar Jawa, 2004-2013.....	21
Tabel 9. Capaian IKU V dari Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri di Wilayah Jawa dan Bali).....	22
Tabel 10. Capaian IKU VI dari Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri di Wilayah Jawa dan Bali).....	23
Tabel 11. Pertumbuhan Sektor Industri Manufaktur di Jawa dan Luar Jawa ...	24
Tabel 12. Pertumbuhan Sektor Industri Manufaktur di Wilayah II.....	25
Tabel 13 Capaian IKU VII dari Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri di Wilayah Jawa dan Bali).....	26
Tabel 14. Capaian IKU VIII dari Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri di Wilayah Jawa dan Bali).....	27
Tabel 15. Investasi PMDN dan PMA Tahun 2015 Menurut Provinsi di Wilayah Jawa dan Bali	28
Tabel 16. Investasi PMDN Tahun 2015 terhadap nasional di Wilayah II.....	29
Tabel 17. Investasi PMA Tahun 2015 menurut provinsi di Wilayah II.....	29
Tabel 18. Investasi PMA Tahun 2015 di Wilayah II	30
Tabel 19. Capaian IKU IX dari Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri di Wilayah Jawa dan Bali).....	30
Tabel 20. Capaian IKU IX dari Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri di Wilayah Jawa dan Bali).....	31

Tabel 21. Share Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB di Wilayah II	32
Tabel 22. Capaian IKU dari Tumbuh dan Berkembangnya Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) di Wilayah Jawa dan Bali.....	32
Tabel 23. Capaian IKU dari Tumbuh dan Berkembangnya Kawasan Industri di Wilayah Jawa dan Bali	37
Tabel 24. Capaian IKU dari Tumbuhnya Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (SIKIM) di Wilayah Jawa dan Bali	43
Tabel 25. Capaian IKU dari Berkembangnya industri di daerah melalui Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi/ Kabupaten/Kota di Wilayah Jawa dan Bali.....	47
Tabel 26. Capaian IKU dari Berkembangnya industri di daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik di Wilayah Jawa dan Bali	52
Tabel 27. Capaian IKU dari Forum kegiatan/koordinasi/monev/ pembinaan pengembangan fasilitasi industri di daerah Wilayah II.....	55
Tabel 28. Realisasi Anggaran Direktorat PFI Wilayah II Tahun 2015.....	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Pengembangan Fasilitas Industri Wilayah II	2
Gambar 2. Pertumbuhan Sektor Industri Manufaktur Tahun 2001-2014...	25
Gambar 3. Pertumbuhan Rata-Rata Sektor Industri Manufaktur Tahun 2010-2013 Menurut Provinsi	25

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi

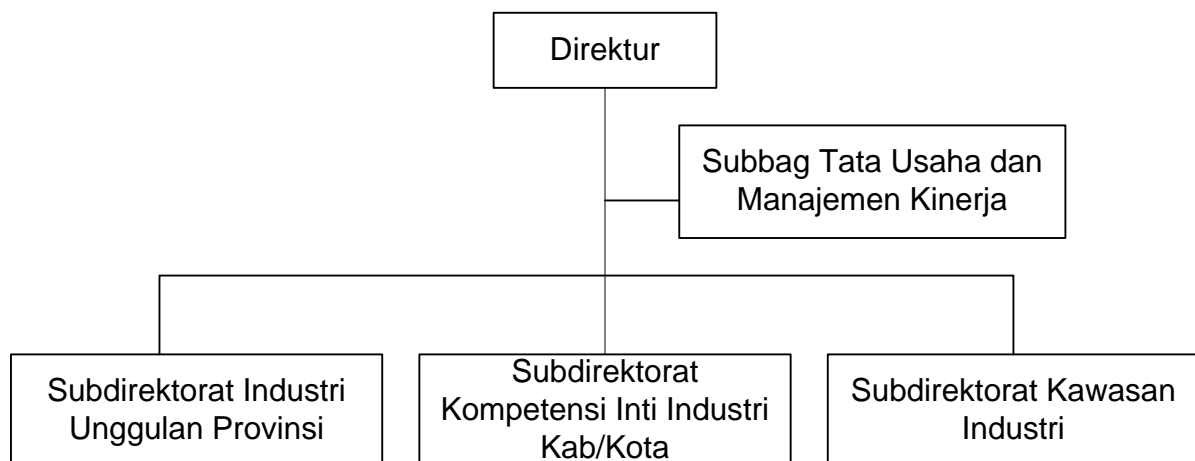
Semenjak dikeluarkannya Undang-undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Direktorat Pengembangan Fasilitas Industri Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan fasilitas industri wilayah Jawa dan Bali.

Dalam melaksanakan tugas Direktorat Pengembangan Fasilitas Industri Wilayah II menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan pengembangan Perwilayahan Industri meliputi Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI, Kawasan Peruntukan Industri (KPI), Kawasan Industri (KI), dan Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKM) di wilayah Jawa dan Bali;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan pengembangan fasilitas industri wilayah Jawa dan Bali;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pengembangan fasilitas industri wilayah Jawa dan Bali;
- d. Penyiapan bimbingan teknis dan evaluasi teknis pengembangan fasilitas industri wilayah Jawa dan Bali; dan
- e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan manajemen kinerja Direktorat.

B. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi seperti pada bagian A diatas, unit organisasi Direktorat Pengembangan Fasilitas Industri Wilayah II dibagi menjadi 3 (tiga) unit Eselon III, dengan struktur seperti pada Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Pengembangan Fasilitas Industri Wilayah II

C. Latar Belakang Kegiatan/Program

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, pembangunan industri diarahkan untuk mewujudkan industri yang berdaya saing, baik di pasar lokal maupun internasional, dan terkait dengan pengembangan industri kecil dan menengah, dengan struktur industri yang sehat dan berkeadilan serta mendorong perkembangan ekonomi di luar Pulau Jawa.

Salah satu misi pembangunan jangka panjang yang terkait dengan pengembangan wilayah adalah mewujudkan pemerataan dan penyebaran pembangunan industri berlandaskan keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh masing-masing wilayah. Pengembangan wilayah tersebut diarahkan untuk memantapkan penataan pengembangan kewilayahan industri dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing daerah yang didukung infrastruktur yang memadai. Hal tersebut didukung dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian yang mengamanatkan untuk diantaranya mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkokuh ketahanan nasional.

Arah pembangunan industri kewilayahan yang hendak dicapai pada dasarnya merupakan upaya untuk melakukan percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui perwilayahan industri, meningkatkan daya saing daerah, yang diharapkan

dapat memberikan dampak positif, baik yang menyangkut penyerapan tenaga kerja, peningkatan investasi dan kredit yang digunakan, maupun dalam memberikan pendapatan bagi masyarakat lokal. Konsep dasar pengembangan industri kewilayahan dengan mengaitkan dan mensinergikan aspek utamanya, yaitu rencana tata ruang wilayah, pendayagunaan potensi sumber daya wilayah secara nasional, peningkatan daya saing industri berlandaskan keunggulan sumber daya yang dimiliki daerah, dan peningkatan nilai tambah sepanjang rantai nilai.

Wilayah Jawa dan Bali relatif lebih maju dan berkembang dibanding wilayah lainnya, namun seiring dengan perubahan lingkungan strategis dan sebagai pusat kegiatan ekonomi nasional maka wilayah Jawa dan Bali akan menghadapi isu strategis antara lain menghadapi jumlah penduduk perkotaan, struktur ekonomi bergeser pada peningkatan sektor jasa dan industri berbasis teknologi tinggi dan pengetahuan serta ramah lingkungan. Pada dasarnya pembangunan sektor industri di daerah diserahkan kepada peran aktif pemerintah daerah, sektor swasta, sementara pemerintah pusat lebih banyak berperan sebagai fasilitator yang mendorong dan memberikan berbagai kemudahan bagi aktivitas-aktivitas sektor swasta.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa perencanaan strategis merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Perencanaan strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi (yang meliputi kebijakan, program, dan kegiatan yang realistis) dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Direktorat Pengembangan Fasilitas Industri Wilayah II sebagai unit pada Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan suatu dokumen perencanaan yang disusun untuk dijadikan sebagai alat bantu untuk memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan perwilayahan industri di Jawa dan Bali dengan melakukan perencanaan terpadu dan menyelaraskan pelaksanaan program, serta pengendaliannya untuk kurun waktu 2015-2019, sehingga diharapkan mampu mendukung pencapaian tugas pokok dan fungsi Direktorat Pengembangan Fasilitas Industri Wilayah, selain itu juga merupakan tolok ukur pencapaian sasaran dan kinerja.

A. Rencana Strategis Direktorat Pengembangan Fasilitas Industri Wilayah II

1. Visi dan Misi

a. Visi

Visi Direktorat pengembangan Fasilitas Industri Wilayah II adalah :
“Terwujudnya Industri Unggulan di Jawa dan Bali yang Berdaya Saing Global”

b. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut di atas, Direktorat pengembangan Fasilitas Industri Wilayah II mengemban misi :

- Peningkatan daya saing industri Jawa dan Bali melalui fasilitas, regulasi dan implementasi pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Industri dan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah;

- Memfasilitasi pembangunan industri daerah berlandaskan potensi sumber daya yang dimiliki daerah;
- Mengoordinasikan dan melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana industri dalam mendukung perwilayahan industri;

2. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Tujuan pengembangan perwilayahan industri Direktorat Pengembangan Fasilitas Industri Wilayah II adalah :

- a. Terwujudnya percepatan pembangunan industri dengan berkembangnya WPPI, KPI dan KI yang dimotori oleh :
 - 1) Tumbuhnya industri baru berskala besar yang mengolah potensi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan di Jawa dan Bali untuk memaksimalkan nilai tambah di dalam negeri
 - 2) Tumbuhnya industri baru yang sangat strategis dalam memperkuat struktur industri
- b. Terwujudnya percepatan pemerataan pembangunan industri melalui penumbuhan Sentra IKM berbasis potensi sumber daya daerah.
- c. Meningkatnya kualitas industri dan infrastruktur pendukung industri di Jawa dan Bali

b. Sasaran

Berlandaskan visi dan misi, maka dapat ditetapkan sasaran sebagai berikut :

- 1) Fasilitas koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan nasional, Pemerintah, dan Pemerintah daerah dalam peningkatan kinerja industri di Jawa dan Bali;
- 2) Fasilitas pembangunan pusat-pusat pertumbuhan industri di Jawa dan Bali;
- 3) Tumbuh dan berkembangnya kawasan industri;
- 4) Tumbuh dan berkembangnya sentra industri kecil dan menengah;
- 5) Meningkatnya ketersediaan infrastruktur industri;

- 6) Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
- 7) Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran;
- 8) Meningkatnya kualitas pelaporan pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- 9) Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan kualitas tata kelola keuangan.

3. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Pengembangan Fasilitas Industri Wilayah II

Arah kebijakan Direktorat Pengembangan Fasilitas Industri Wilayah II adalah menarik investasi industri dengan menyediakan tempat industri tersebut dibangun, dalam arti tempat yang seluruh sarana prasarana yang dibutuhkan telah tersedia. Setelah itu baru kebijakan yang menyangkut arah pertumbuhan populasi tersebut serta arah peningkatan produktivitasnya. Uraian rinci tentang arah kebijakan pembangunan industri adalah sebagai berikut:

- 1) Pengembangan Perwilayahan Industri di Wilayah Jawa dan Bali : (a) Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri terutama yang berada dalam Koridor ekonomi; (b) Kawasan Peruntukan Industri; (c) Kawasan Industri; dan (d) Sentra IKM. Strategi pengembangan perwilayahan industri adalah:
 - a. Memfasilitasi perencanaan pembangunan kawasan industri di Wilayah Jawa dan Bali;
 - b. Memfasilitasi perencanaan pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah (Sentra IKM) di Wilayah Jawa dan Bali;
 - c. Berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan dalam membangun infrastruktur utama (jalan, listrik, air minum, telekomunikasi, pengolahan limbah, dan logistik), infrastruktur pendukung tumbuhnya industri, dan sarana pendukung kualitas kehidupan (Quality Working Life) bagi pekerja.
- 2) Peningkatan Daya Saing dan Produktivitas (nilai ekspor dan nilai tambah per tenaga kerja).

Sesuai dengan visi dan misi tersebut, maka Direktorat PFI Wilayah II telah menetapkan 5 sasaran strategis yang dapat dirinci sebagai berikut :

Sasaran Strategis I :

Fasilitasi Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pembangunan Nasional, Pemerintah, Dan Pemerintah daerah dalam peningkatan kinerja industri di Jawa dan Bali. Bentuk koordinasi dan sinkronisasi dituangkan dalam penataan ruang dan rencana induk pembangunan industri yang terintegrasi. Indikator yang digunakan adalah

- 1) Penataan kawasan industri dan kegiatan industri yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan
- 2) Tesusunnya rencana induk pembangunan industri Daerah (REPIDA) Kabupaten/Kota dan Provinsi.

Sasaran Strategis II:

Fasilitasi pembangunan pusat-pusat pertumbuhan industri di Jawa dan Bali dengan pengembangan 5 (lima) Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri di 4 Provinsi. Untuk Provinsi DKI. Jakarta, DI. Yogyakarta, dan Bali, tidak memiliki WPPI, tetapi disiapkan sebagai pendukung WPPI.

Tabel 1. Daerah-daerah yang ditetapkan sebagai WPPI

No	Lokasi Kabupaten/Kota	Provinsi
1	Cirebon-Indramayu-Majalengka	Jawa Barat
2	Bogor-Bekasi-Purwakarta-Subang-Karawang	Jawa Barat
3	Kendal-Semarang-Demak	Jawa Tengah
4	Tuban-Lamongan-Gresik-Surabaya-Sidoarjo-Mojokerto-Bangkalan	Jawa Timur
5	Cilegon-Serang-Tangerang	Banten

Pusat-pusat pertumbuhan industri atau disebut dengan WPPI merupakan wilayah yang menjadi polar dari kegiatan industri. Pertumbuhan ini diindikasikan melalui:

- 1) Laju pertumbuhan PDRB industri pengolahan non-migas di WPPI;
- 2) Kontribusi PDRB industri pengolahan non-migas terhadap PDRB di WPPI.

Sasaran Strategis III:

Tumbuh dan berkembangnya kawasan industri di Wilayah Jawa dan Bali. Adanya kewajiban kegiatan industri berada di dalam kawasan industri atau minimal berada di KPI (Jika Kawasan Industri Penuh atau belum ada) memberikan dorongan untuk kegiatan industri berada di dalam kawasan. Untuk mendukung perlu disiapkan kawasan industri yang memadai sebagai tampungan relokasi dan munculnya kegiatan industri. Bentuk dukungan berupa fasilitasi masterplan, *Feasibility Study*, Detail Engineering Desain kawasan industri. Membangun kawasan industri baru, baik dilakukan oleh swasta maupun pemerintah. Kawasan industri yang dibangun oleh Pemerintah diprioritaskan untuk berada di luar Pulau Jawa. Kawasan industri yang dibangun berada di daerah-daerah yang telah memiliki rencana pengembangan kawasan industri. Dalam periode tahun 2015-2019, Direktorat PFI Wilayah II akan memfasilitasi rencana pembangunan kawasan industri di Jawa dan Bali.

Indikator yang digunakan dalam sasaran ini adalah:

- 1) Bertambahnya jumlah dan luas kawasan industri di Jawa dan Bali
- 2) Bertambahnya investasi di dalam kawasan industri
- 3) Keteraturan dalam lokasi dan lingkungan kawasan industri dan kegiatan industri.

Sasaran Strategis IV:

Tumbuh dan berkembangnya sentra industri kecil dan menengah di Wilayah Jawa dan Bali. Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (SIKIM) adalah lokasi pemusatan kegiatan industri kecil dan industri menengah yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan bahan baku sejenis dan atau mengerjakan proses produksi yang sama, dilengkapi sarana dan prasarana penunjang. Tujuan pendirian SIKIM adalah untuk mendorong daya saing IKM melalui pemanfaatan teknologi, inovasi dan kreativitas dalam suatu lokasi yang terintegrasi. Tumbuh dan berkembangnya SIKIM di daerah diharapkan dapat mendorong penyebaran dan pemerataan pembangunan industri. Indikator berupa:

- 1) Meningkatnya jumlah SIKIM yang terbangun dan beroperasi;
- 2) Meningkatnya jumlah IKM yang masuk ke dalam SIKIM.

Sasaran Strategis V:

Meningkatnya ketersediaan infrastruktur industri di Wilayah Jawa dan Bali. Pembangunan infrastruktur industri dimaksudkan untuk menjamin tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan industri yang efisien dan efektif. Infrastruktur yang diperlukan oleh industri, baik yang berada di dalam dan/atau di luar Kawasan Peruntukan Industri, meliputi energi dan lahan kawasan industri. Penyediaan infrastruktur industri dilakukan melalui koordinasi antar kementerian/lembaga, pembangunan dan pengembangan infrastruktur industri, dan fasilitasi penyediaan infrastruktur industri. Sasaran ini diindikasikan melalui:

- 1) Jumlah kawasan industri yang dibangun dan beroperasi;
- 2) Jumlah sentra IKM yang dibangun dan beroperasi

Sasaran Strategis VI:

Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi. Diperlukan sarana dan prasarana kerja yang memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Sasaran ini diindikasikan melalui tingkat pemenuhan sarana dan prasarana kerja

Sasaran Strategis VII:

Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran. Dari sasaran ini diharapkan dapat menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan dengan memperhatikan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkeadilan. Indikator kinerja adalah tingkat kesesuaian rencana kegiatan dengan dokumen perencanaan.

Sasaran Strategis VIII:

Meningkatnya kualitas pelaporan pelaksanaan kegiatan dan anggaran. Pemerintah melalui Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai tindak lanjut Tap MPR RI dan Undang-Undang tersebut, mewajibkan tiap pimpinan Departemen/ Lembaga Pemerintahan Non Departemen, Pemerintah Daerah, Satuan Kerja atau Unit Kerja di dalamnya, membuat laporan akuntabilitas kinerja secara berjenjang serta berkala untuk

disampaikan kepada atasannya. Laporan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan kegiatan dan anggaran dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (Good Governance). Indikator kinerja adalah:

- 1) Tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan;
- 2) Nilai SAKIP Kementerian Perindustrian dan Ditjen Pengembangan Perwiliayahan Industri

Sasaran Strategis IX:

Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan kualitas tata kelola keuangan. Undang-Undang no 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas dalam keuangan publik. Laporan keuangan memang merupakan salah satu hasil dari transparansi dan akuntabilitas keuangan publik. Dan ini berarti laporan keuangan yang disusun pun harus memenuhi syarat akuntabilitas dan transparansi. Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran ini adalah tingkat kualitas laporan keuangan.

B. Rencana Kinerja

1. Sasaran

Dalam rangka mencapai visi dan misi Direktorat Pengembangan Fasilitas Industri Wilayah II, maka telah ditetapkan sasaran program/kegiatan pengembangan wilayah II yang mencakup Wilayah Jawa dan Bali yaitu:

- a. Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri di Wilayah Jawa dan Bali;
- b. Tumbuh dan berkembangnya Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) di Wilayah Jawa dan Bali;
- c. Tumbuh dan berkembangnya kawasan industri di Wilayah Jawa dan Bali;
- d. Tumbuhnya Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (SIKIM) di Wilayah Jawa dan Bali;
- e. Berkembangnya industri di daerah melalui penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi/Kabupaten/Kota di Wilayah Jawa dan Bali;
- f. Berkembangnya industri di daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik di Wilayah Jawa dan Bali.

2. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama untuk mengukur capaian sasaran program/kegiatan sesuai dengan rencana strategis dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2. Indikator Kinerja Utama Sasaran Program/Kegiatan Dit. PFI Wilayah II Tahun 2015

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri di Wilayah Jawa dan Bali	Meningkatnya kontribusi nilai tambah sektor industri di Wilayah Jawa terhadap nilai tambah sektor industri nasional	Persentase	72,27%
		Meningkatnya kontribusi nilai tambah sektor industri di Wilayah Bali terhadap nilai tambah sektor industri nasional	Persentase	0,55%
		Meningkatnya unit usaha industri besar sedang di Wilayah Jawa terhadap total populasi industri besar sedang nasional	Persentase	80,66%
		Meningkatnya unit usaha industri besar sedang di Wilayah Bali terhadap total populasi industri besar sedang nasional	Persentase	1,54%
		Meningkatnya pertumbuhan sektor industri di Wilayah Jawa	Persentase	6,97%
		Meningkatnya pertumbuhan sektor industri di Wilayah Bali	Persentase	7,80%
		Meningkatnya kontribusi investasi sektor industri di Wilayah Jawa	Persentase	68,91%
		Meningkatnya kontribusi investasi sektor industri di Wilayah Bali	Persentase	0,15%
		Meningkatnya share sektor industri terhadap total PDRB di Wilayah Jawa	Persentase	25,35%
		Meningkatnya share sektor industri terhadap total PDRB di Wilayah Bali	Persentase	8,85%
2	Tumbuh dan berkembangnya Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) di	Tersusunnya masterplan pengembangan WPPI	Persentase	4 dokumen

	wilayah Jawa dan Bali			
3	Tumbuh dan berkembangnya kawasan industri di Wilayah Jawa dan Bali	Terfasilitasinya kawasan industri dalam penyusunan kajian dan dokumen perencanaan pembangunan	Persentase	2 kawasan industri
4	Tumbuhnya Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (SIKIM) di Wilayah Jawa dan Bali	Terfasilitasinya sentra IKM dalam penyusunan rencana pembangunan	Persentase	3 SIKIM
5	Berkembangnya industri di daerah melalui penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi/Kabupaten/Kota di Wilayah Jawa dan Bali	Terfasilitasinya penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi/Kabupaten/Kota	Persentase	16 daerah
6	Berkembangnya industri di daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik di Wilayah Jawa dan Bali	Terfasilitasinya industri di daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik	Persentase	4 daerah
7	Forum kegiatan/koordinasi/monev/pembinaan pengembangan fasilitasi industri di daerah wilayah II	Tersusunnya program pengembangan industri daerah wilayah II	Persentase	4 dokumen
		Terlayannya operasional perkantoran	Persentase	12 bulan
		Terlaksananya penerapan budaya kerja 5K	Persentase	1 satker

C. Rencana Anggaran

Untuk mewujudkan rencana kinerja Direktorat Pengembangan Fasilitas Industri Wilayah II tahun 2015 dialokasikan anggaran melalui DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) dengan Pagu Awal Sebesar Rp.19.750.000.000,- (Sembilan belas miliar tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah), yang meliputi program utama dan program penunjang. Anggaran tersebut kemudian terkena penghematan anggaran perjalanan dinas dan paket meeting sebesar Rp 1.277.977.044,- (satu miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat puluh empat rupiah) sehingga pagu berkurang menjadi sebesar Rp 18.472.022.956,- (delapan belas miliar empat ratus tujuh puluh dua juta dua puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah). Namun pada perkembangan terjadi pengembalian anggaran penghematan dengan besaran yang sama sehingga pagu akhir tidak berubah seperti pada pagu awal.

Terdapat satu komponen yaitu Fasilitas Rencana Pembangunan Kawasan Industri Kecil/Sentra di Jawa Timur, dengan anggaran sebesar Rp 1.387.886.000,- yang karena keterbatasan waktu tidak dilaksanakan sehingga *direfocusing*.

Adapun alokasi anggaran masing-masing kegiatan yang tercakup dalam program kegiatan disajikan dalam tabel 2 dibawah ini:

Tabel 3. Program Kegiatan Direktorat Pengembangan Fasilitas Industri Wilayah II Tahun 2015

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT/KOMPONEN/SUB KOMPONEN	ANGGARAN (Rp.)
1	Tumbuh dan berkembangnya Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) di Wilayah Jawa dan Bali	Penyusunan Masterplan Pengembangan WPPI di Banten dan Jawa Tengah	1.417.472.000,-
		Penyusunan Masterplan Pengembangan WPPI di Jawa Barat dan Jawa Timur	1.415.150.000,-
2	Tumbuh dan berkembangnya kawasan industri di Wilayah Jawa dan Bali	Fasilitas Perencanaan Pembangunan Kawasan Industri di Jawa (Banyuwangi dan Majalengka) dan Madura (Bangkalan)	2.912.264.000,-
		Fasilitas Pengembangan Kawasan Industri di Jawa (Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur)	2.348.523.000,-
3	Tumbuhnya Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (SIKIM) di Wilayah Jawa dan Bali	Penyusunan Pola Pengembangan Sentra IKM di Jawa Tengah dan Jawa Timur	1.416.330.000,-
		Penyusunan Pola Pengembangan Sentra IKM di Jawa Barat	849.000.000,-
		Fasilitas Rencana Pembangunan Kawasan Industri Kecil/Sentra di Jawa Timur	1.387.886.000,-
4	Berkembangnya industri di daerah melalui penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi/Kabupaten/Kota di Wilayah Jawa dan Bali	Fasilitas Penyusunan Rencana Pengembangan Industri Provinsi di DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat	397.000.000,-

		Fasilitasi Penyusunan Rencana Pengembangan Industri Provinsi di Jawa Tengah, D.I.Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali	525.880.000,-
		Fasilitasi Penyusunan Rencana Pengembangan Industri Kabupaten di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur	2.713.452.000,-
5	Berkembangnya industri di daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik di Wilayah Jawa dan Bali	Fasilitasi Pengembangan Industri Unggulan Daerah Tertinggal di Kabupaten Sukabumi dan Lebak	1.902.850.000,-
		Fasilitasi Pengembangan Industri Unggulan Daerah Tertinggal di Bondowoso dan Bangkalan	1.950.910.000,-
6	Forum kegiatan/koordinasi/ monev/pembinaan pengembangan fasilitasi industri di daerah Wilayah II	Koordinasi Penyusunan Program Pengembangan Industri Daerah Wilayah II	192.603.000,-
		Layanan Manajemen Kinerja	275.680.000,-
Jumlah			19.750.000.000,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Penilaian atas pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri (Ditjen PPI) dilakukan melalui pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan / program / kebijakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja terdiri dari dua jenis, yaitu :

- (1) Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi *maximize* (indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih tinggi dari nilai target yang ditetapkan) :

$$\text{Indeks Capaian} = \text{realisasi} / \text{target} \times 100\%$$

- (2) Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi *minimize* (indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih kecil dari nilai target yang ditetapkan) :

$$\text{Indeks Capaian} = [(2 \times \text{target}) - \text{realisasi}] / \text{target} \times 100\%$$

Direktorat PFI Wilayah II melakukan pengukuran Kinerja dengan 7 sasaran strategis dan 17 indikator kinerja utama, yaitu:

1. **Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri di wilayah Jawa dan Bali**
 - a) **Indikator Kinerja:** Meningkatkan kontribusi nilai tambah sektor industri di wilayah Jawa terhadap nilai tambah sektor industri nasional.

Tabel 4. Capaian IKU I dari Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri di wilayah Jawa dan Bali

Sasaran program/kegiatan	IKU	2014			2015		
		T	R	Capaian (%)	T	R	Capaian (%)
Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri di Wilayah Jawa dan Bali	Meningkatnya kontribusi nilai tambah sektor industri di Wilayah Jawa terhadap nilai tambah sektor industri nasional				72,27%	71,03%	98,28%
Nilai Capaian Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri di Wilayah Jawa dan Bali							98,28%

Target yang ditetapkan pada tahun 2015 adalah 72,27 persen, sementara realisasinya adalah 71,03%. Perhitungan kontribusi nilai tambah sektor industri tahun 2015 dilakukan dengan menggunakan basis data perkembangan ekonomi nasional sampai dengan Triwulan III tahun 2015 yang telah dirilis oleh BPS. Diperkirakan sampai dengan akhir tahun 2015, pangsa nilai tambah sektor industri tersebut tidak akan banyak mengalami perubahan.

b) Indikator Kinerja Utama : Meningkatnya kontribusi nilai tambah sektor industri di wilayah Bali terhadap nilai tambah sektor industri nasional.

Tabel 5. Capaian IKU II dari Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri di wilayah Jawa dan Bali

Sasaran program/kegiatan	IKU	2014			2015		
		T	R	Capaian (%)	T	R	Capaian (%)
Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri di Wilayah Jawa dan Bali	Meningkatnya kontribusi nilai tambah sektor industri di Wilayah Bali terhadap nilai tambah sektor industri nasional				0,55%	0,40%	72,73%
Nilai Capaian Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri di Wilayah Jawa dan Bali							72,73%

Target yang ditetapkan pada tahun 2015 adalah 0,55 persen, sementara realisasinya adalah 0,40%. Perhitungan kontribusi nilai tambah sektor industri tahun 2015 dilakukan dengan menggunakan basis data perkembangan ekonomi nasional sampai dengan Triwulan III tahun 2015 yang telah dirilis oleh BPS. Diperkirakan sampai dengan akhir tahun 2015, kontribusi nilai tambah sektor industri tersebut tidak akan banyak mengalami perubahan.

Tidak tercapainya target kontribusi nilai tambah sektor industri di seluruh Wilayah Jawa dan Bali seiring dengan perkembangan sektor industri di tingkat nasional. Tidak optimalnya peningkatan kontribusi nilai tambah sektor industri ini disebabkan antara lain menurunnya kinerja sektor industri dikarenakan adanya ketidakpastian nilai tukar rupiah terhadap dollar yang cenderung meningkat pada tahun 2015 sehingga meningkatkan biaya produksi sektor industri yang menggunakan bahan baku impor. Secara kumulatif data impor Indonesia awal tahun 2015 mengalami penurunan mencapai US\$ 36,70 miliar atau sebesar 15,10% dibanding dengan periode yang sama tahun sebelumnya (yoy). Di tingkat global disebabkan oleh menurunnya ekspor

produk-produk hasil industri ke negara-negara tujuan ekspor utama seperti China, Amerika Serikat, Jepang dan Eropa sebagai akibat melemahnya perekonomian di negara-negara tersebut. Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia mencapai US\$ 39,13 miliar atau turun sebesar 11,67% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (yoy). Di tingkat nasional, penurunan kontribusi tersebut sebagai akibat tidak optimalnya kinerja sektor industri sehingga menurunkan daya saing karena faktor-faktor seperti ketersediaan gas yang sangat terbatas untuk sektor industri, keterbatasan pasokan energi listrik, masalah infrastruktur yang menyebabkan tingginya biaya logistik, iklim investasi yang belum sepenuhnya kondusif seperti perijinan, pertanahan, perpajakan dan faktor birokrasi.

- c) **Indikator Kinerja Utama** : Meningkatnya unit usaha industri besar sedang di Wilayah Jawa terhadap total populasi industri besar sedang nasional.

Tabel 6. Capaian IKU III dari Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri di wilayah Jawa dan Bali

Sasaran program/kegiatan	IKU	2014			2015		
		T	R	Capaian (%)	T	R	Capaian (%)
Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri di Wilayah Jawa dan Bali	Meningkatnya unit usaha industri besar sedang di Wilayah Jawa terhadap total populasi industri besar sedang nasional				80,66%	80,34%	99,60%
Nilai Capaian Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri di Wilayah Jawa dan Bali							99,60%

Target yang ditetapkan pada tahun 2015 adalah 80,66 persen, sementara realisasinya adalah 80,34% persen. Perhitungan unit usaha industri besar sedang

pada tahun 2015 dilakukan dengan menggunakan basis data perkembangan ekonomi nasional sampai dengan Triwulan III tahun 2015 yang telah dirilis oleh BPS. Diperkirakan sampai dengan akhir tahun 2015, peningkatan unit usaha industri besar sedang tersebut tidak akan banyak mengalami perubahan.

- d) **Indikator Kinerja Utama** :meningkatnya unit usaha industri besar sedang di Wilayah Bali terhadap total populasi industri besar sedang nasional

Tabel 7. Capaian IKU IV dari Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri di wilayah Jawa dan Bali

Sasaran Program/kegiatan	IKU	2014			2015		
		T	R	Capaian (%)	T	R	Capaian (%)
Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri di Wilayah Jawa dan Bali	Meningkatnya unit usaha industri besar sedang di Wilayah Bali terhadap total populasi industri besar sedang nasional				1,54%	1,47%	95,45%
Nilai Capaian Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri di Wilayah Jawa dan Bali)							95,45%

Target yang ditetapkan pada tahun 2015 adalah 1,54 persen, sementara realisasinya adalah 1,47 persen. Perhitungan jumlah unit usaha industri besar sedang pada tahun 2015 dilakukan dengan menggunakan basis data jumlah unit usaha industri besar sedang pada tahun 2013. Diperkirakan sampai dengan akhir tahun 2015, jumlah unit usaha industri besar sedang tersebut tidak akan banyak mengalami perubahan.

Capaian jumlah unit besar dan sedang di Pulau Jawa dan Bali dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti regulasi/kebijakan di tingkat pusat dan daerah yang kurang

mendukung pengembangan industri besar dan sedang di Jawa dan Bali, serta ketersediaan hard infrastruktur maupun soft infrastruktur yang belum memadai.

Tabel 8. Jumlah Industri Pengolahan Besar dan Sedang, Jawa dan Luar Jawa, 2004-2013

Lokasi	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013*
Jawa	16.901	16.995	24.348	23.067	21.207	20.397	19.529	19.440	19.554	19.773
Luar Jawa	3.784	3.734	5.120	4.931	4.487	4.071	3.816	3.930	4.038	4.168
Jumlah	20.685	20.729	29.468	27.998	25.694	24.468	23.345	23.370	23.592	23.941

Catatan : *) Angka Sementara

Sumber: www.bps.go.id- 2013

e) **Indikator Kinerja Utama** : Meningkatnya pertumbuhan sektor industri di Wilayah Jawa

Tabel 9. Capaian IKU V dari Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri di wilayah Jawa dan Bali

Sasaran Program/kegiatan	IKU	2014			2015		
		T	R	Capaian (%)	T	R	Capaian (%)
Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri di Wilayah Jawa dan Bali	Meningkatnya pertumbuhan sektor industri di Wilayah Jawa				6,97%	5,87%	84,22%
Nilai Capaian Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri di Wilayah Jawa dan Bali)							84,22%

Target yang ditetapkan pada tahun 2015 adalah 6,97 persen, sementara realisasinya adalah 5,87 persen. Perhitungan peningkatan pertumbuhan sektor industri pada tahun 2015 dilakukan dengan menggunakan basis data perkembangan ekonomi nasional sampai dengan Triwulan III tahun 2015 yang telah dirilis oleh BPS.

Diperkirakan sampai dengan akhir tahun 2015, pertumbuhan sektor industri tersebut tidak akan banyak mengalami perubahan.

- f) **Indikator Kinerja Utama** : Meningkatnya pertumbuhan sektor industri di Wilayah Bali.

Tabel 10. Capaian IKU VI dari Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri di wilayah Jawa dan Bali

Sasaran program/kegiatan	IKU	2014			2015		
		T	R	Capaian (%)	T	R	Capaian (%)
Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri di Wilayah Jawa dan Bali	Meningkatnya pertumbuhan sektor industri di Wilayah Bali				7,80%	8,88%	113,85%
Nilai Capaian Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri di Wilayah Jawa dan Bali)							113,85%

Target yang ditetapkan pada tahun 2015 adalah 7,80 persen, sementara realisasinya adalah 8,88 persen. Perhitungan peningkatan pertumbuhan sektor industri pada tahun 2015 dilakukan dengan menggunakan basis data perkembangan ekonomi nasional sampai dengan Triwulan III tahun 2015 yang telah dirilis oleh BPS. Diperkirakan sampai dengan akhir tahun 2015, pertumbuhan sektor industri tersebut tidak akan banyak mengalami perubahan.

Tidak tercapainya target pertumbuhan sektor industri di seluruh Wilayah Jawa seiring dengan perkembangan sektor industri di tingkat nasional. Tidak optimalnya peningkatan kontribusi nilai tambah sektor industri ini disebabkan antara lain menurunnya kinerja sektor industri dikarenakan adanya ketidakpastian nilai tukar rupiah terhadap dollar yang cenderung meningkat pada tahun 2015 sehingga meningkatkan biaya produksi sektor industri yang menggunakan bahan baku impor. Secara kumulatif data impor Indonesia awal tahun 2015 mengalami penurunan

mencapai US\$ 36,70 miliar atau sebesar 15,10% dibanding dengan periode yang sama tahun sebelumnya (yoy). Di tingkat global disebabkan oleh menurunnya ekspor produk-produk hasil industri ke negara-negara tujuan ekspor utama seperti China, Amerika Serikat, Jepang dan Eropa sebagai akibat melemahnya perekonomian di negara-negara tersebut. Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia mencapai US\$ 39,13 miliar atau turun sebesar 11,67% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (yoy). Di tingkat nasional, penurunan kontribusi tersebut sebagai akibat tidak optimalnya kinerja sektor industri sehingga menurunkan daya saing karena faktor-faktor seperti ketersediaan gas yang sangat terbatas untuk sektor industri, keterbatasan pasokan energi listrik, masalah infrastruktur yang menyebabkan tingginya biaya logistik, iklim investasi yang belum sepenuhnya kondusif seperti perijinan, pertanahan, perpajakan dan faktor birokrasi.

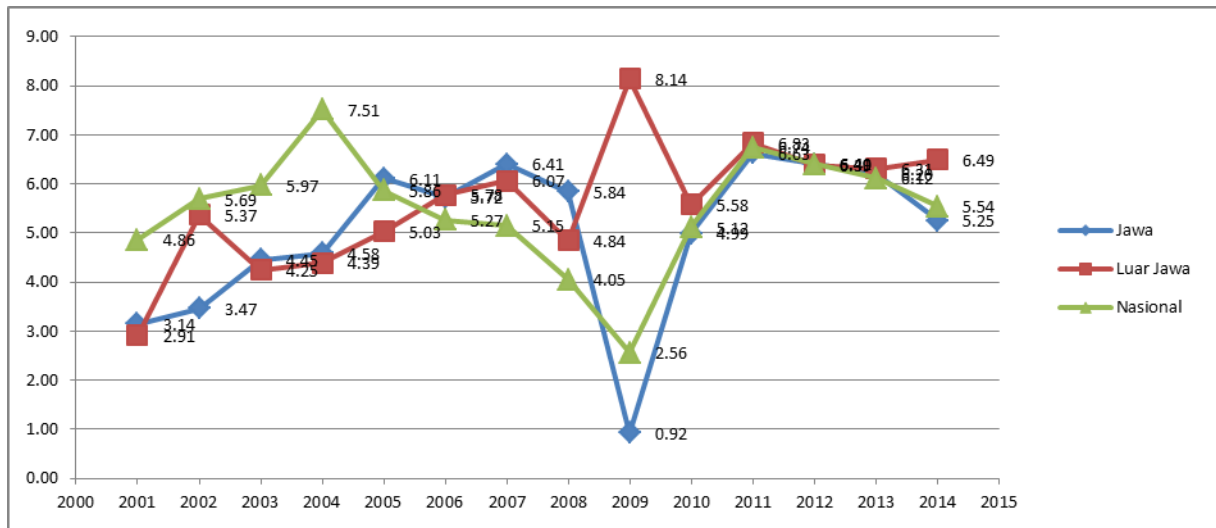
Capaian pertumbuhan sektor industri di Bali yang melebihi target dikarenakan industri-industri yang ada di Bali adalah industri yang diarahkan untuk mendukung sektor pariwisata yang tidak selalu dipengaruhi oleh kondisi meneter. Hal ini berbanding terbalik dengan kondisi industri di Jawa yang di dominasi oleh industri manufaktur.

Tabel 11. Pertumbuhan Sektor Industri Manufaktur di Jawa dan Luar Jawa

(Dalam Persen)

No.	Wilayah	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014*)
1	Jawa	4,45	4,58	6,11	5,72	6,41	5,84	0,92	4,99	6,63	6,41	6.20	5.25
2	Luar Jawa	4,25	4,39	5,03	5,78	6,07	4,84	8,14	5,58	6,83	6,39	6.31	6.49
	Nasional	5,97	7,51	5,86	5,27	5,15	4,05	2,56	5,12	6,74	6,40	6.12	5.54

Sumber : BPS (Diolah Ditjen PPI, Kemenperin, 2014)



Sumber : BPS (Diolah Ditjen PPI, Kemenperin, 2014)

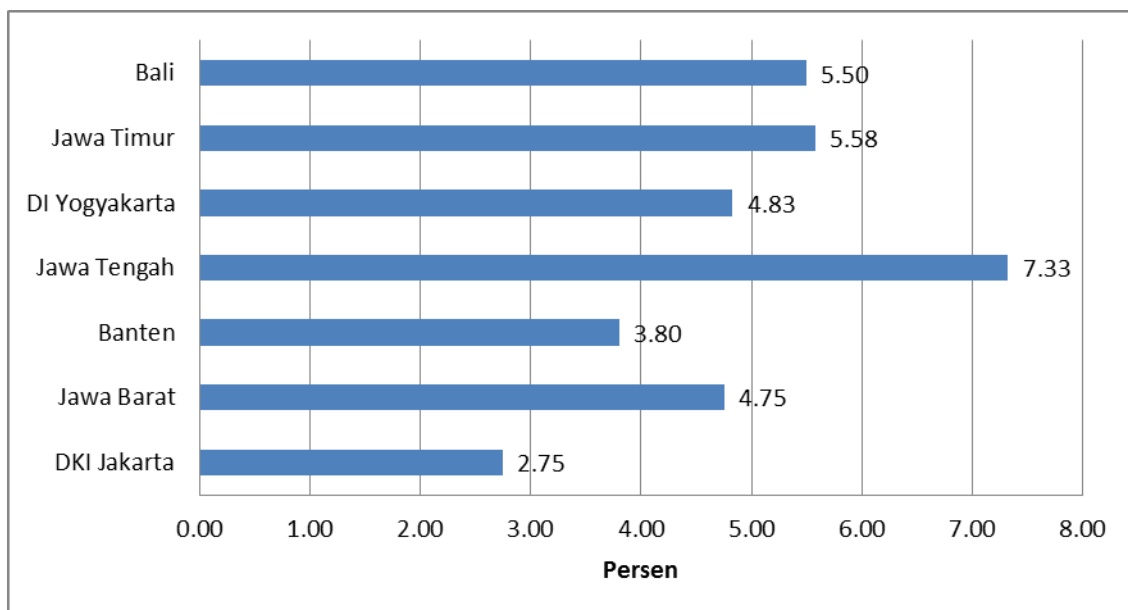
Gambar 2. Pertumbuhan Sektor Industri Manufaktur Tahun 2001-2014

Tabel 12. Pertumbuhan Sektor Industri Manufaktur di Wilayah II

(Dalam Persen)

No.	Wilayah	2010	2011	2012	2013	2014	Rata-Rata
1	Jawa	4.19	5.63	4.51	5.12	4.64	4.82
2	Bali	6.07	3.13	6.04	6.75	6.11	5.62

Sumber : BPS (Diolah Ditjen PPI, Kemenperin, 2014)



Sumber : BPS (Diolah Ditjen PPI, Kemenperin, 2014)

Gambar 3. Pertumbuhan Rata-Rata Sektor Industri Manufaktur Tahun 2010-2013 Menurut Provinsi

g) **Indikator Kinerja Utama** : Meningkatnya kontribusi investasi sektor industri di Wilayah Jawa.

Tabel 13. Capaian IKU VII dari Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri di wilayah Jawa dan Bali

Sasaran Strategis	IKU	2014			2015		
		T	R	Capaian (%)	T	R	Capaian (%)
Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri di Wilayah Jawa dan Bali	Meningkatnya kontribusi investasi sektor industri di Wilayah Jawa				68,91%	69,52%	100,89%
Nilai Capaian Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri di Wilayah Jawa dan Bali)							100,89%

Target yang ditetapkan pada tahun 2015 adalah 68,91% persen, sementara realisasinya adalah 100,89 persen. Perhitungan peningkatan kontribusi investasi sektor industri pada tahun 2015 dilakukan dengan menggunakan basis data kontribusi investasi nasional sampai dengan Triwulan III tahun 2015 yang telah dirilis oleh BKPM. Diperkirakan sampai dengan akhir tahun 2015, peningkatan kontribusi investasi sektor industri tersebut tidak banyak mengalami perubahan.

h) **Indikator Kinerja Utama** : Meningkatnya kontribusi investasi sektor industri di Wilayah Bali.

Tabel 14. Capaian IKU VIII dari Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri di wilayah Jawa dan Bali

Sasaran Strategis	IKU	2014			2015		
		T	R	Capaian (%)	T	R	Capaian (%)
Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri di Wilayah Jawa dan Bali	Meningkatnya kontribusi investasi sektor industri di Wilayah Bali				0,15%	0,89%	593,33%
Nilai Capaian Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri di Wilayah Jawa dan Bali)							593,33%

Target yang ditetapkan pada tahun 2015 adalah 0,15 persen, sementara realisasinya adalah 593,33 persen. Perhitungan peningkatan kontribusi investasi sektor industri pada tahun 2015 dilakukan dengan menggunakan basis data kontribusi investasi nasional sampai dengan Triwulan III tahun 2015 yang telah dirilis oleh BKPM. Diperkirakan sampai dengan akhir tahun 2015, peningkatan kontribusi investasi sektor industri tersebut tidak banyak mengalami perubahan.

Tercapainya target investasi ke sektor industri manufaktur di Pulau Jawa dan Bali lebih banyak disebabkan oleh faktor-faktor seperti adanya upaya Pemerintah dalam memperbaiki birokrasi/regulasi untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Secara nasional, investasi PMDN dan PMA di semua sektor sampai dengan triwulan III tahun 2015 mencapai Rp. 400,09 triliun. Investasi di industri pengolahan mencapai 39,4 persen dari total investasi PMA dan PMDN.

Tabel 15. Investasi PMDN dan PMA Tahun 2015 Menurut Provinsi di Indonesia

NO.	LOKASI	Nilai	
		Miliar Rp.	%
I	SUMATERA	65.876,97	16,47
II	JAWA	219.399,33	54,84
1	DKI JAKARTA	43.308,66	10,82
2	JAWA BARAT	88.913,46	22,22
3	JAWA TENGAH	17.992,1	4,5
4	D.I YOGYAKARTA	1.363,01	0,34
5	JAWA TIMUR	39.651,8	9,91
6	BANTEN	28.170,2	7,04
III	BALI & NUSA TENGGARA	14.057,75	3,51
7	B A L I	6.913,1	1,73
IV	KALIMANTAN	64.970,5	16,24
V	SULAWESI	19.880,9	4,97
VI	MALUKU	2.740,56	0,68
VII	PAPUA	13.163,05	3,29
	JUMLAH / Total	400.089,18	100,00

Sumber : BKPM (Diolah Ditjen PPI, Kemenperin, 2015)

Secara nasional, investasi PMDN dan PMA tahun 2015 lebih banyak terjadi di Pulau Jawa sekitar 54,84 persen dari total investasi PMDN dan PMA sebesar Rp 400,089 Triliun. Hal ini menunjukkan bahwa Pulau Jawa masih menjadi tujuan utama investasi PMDN dan PMA. Sementara itu, wilayah-wilayah lain di Pulau Jawa seperti Kalimantan dan Sumatera menyerap 16,24 persen dan 16,47 persen dari total investasi PMDN dan PMA. Kementerian Perindustrian melakukan upaya perbaikan birokrasi/regulasi di tingkat nasional dalam rangka mendorong penyebaran dan pemerataan sektor industri dan ekonomi nasional ke luar Pulau Jawa melalui pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), Kawasan Industri (KI) dan Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKM).

Tabel 16. Persentase Investasi PMDN terhadap Nasional di Wilayah II

(Dalam Persen)

Lokasi	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Jawa	57,96	60,40	57,16	51,89	62,35	57,28
Bali Nusa Tenggara	3,50	3,78	3,44	3,43	0,21	1,12

Sumber : BKPM (Diolah Ditjen PPI, Kemenperin, 2015)

Walaupun Pulau Jawa masih menjadi tujuan utama investasi PMDN, namun secara perlahan-lahan kontribusinya terus menurun dalam setahun terakhir ini. Pada tahun 2014, investasi PMDN di Pulau Jawa mencapai 62,35 persen, turun menjadi 57,28 persen pada tahun 2015.

Secara nasional, investasi PMA tahun 2015 lebih banyak terjadi di Pulau Jawa sekitar 53,62 persen dari total investasi PMA sebesar Rp. 266,800 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa Pulau Jawa masih menjadi tujuan utama investasi PMA. Sementara itu, wilayah-wilayah lain di luar Pulau Jawa seperti Sumatera menyerap 13,24 persen dari total investasi PMA. Dalam rangka mendorong penyebaran dan pemerataan sektor industri dan ekonomi nasional, ke depan investasi ke luar Pulau Jawa harus terus didorong.

Tabel 17. Investasi PMA Tahun 2015*) Menurut Provinsi di Wilayah II

NO.	LOKASI	Nilai	
		Miliar Rp.	%
I	SUMATERA	35.322,02	13,24
II	JAWA	143.055	53,62
1	DKI JAKARTA	28.205,6	10,57
2	JAWA BARAT	64.879	24,32
3	JAWA TENGAH	7.669,5	2,87
4	D.I YOGYAKARTA	1.053,6	0,39
5	JAWA TIMUR	21.039,6	7,89
6	BANTEN	20.207,6	7,57
III	BALI & NUSA TENGGARA	12.566	4,71
7	BALI	5.687,6	2,13
IV	KALIMANTAN	48.735,8	18,27
V	SULAWESI	12.322,3	4,62
VI	MALUKU	2.692	1,01
VII	PAPUA	12.107,24	4,54
	JUMLAH	266.800,90	100,00

Tabel 18. Investasi PMA Tahun 2015 di Wilayah II

(Dalam Persen)

Lokasi	2010	2011	2012	2013	2014*)	2015
Jawa	70,92	64,54	55,61	60,54	53,44	53,62
Bali Nusa Tenggara	3,10	0,62	4,59	3,11	3,62	2,13

*) Kumulatif sampai dengan Quartal III 2015

Sumber : BKPM (Diolah Ditjen PPI, Kemenperin, 2015)

- i) **Indikator Kinerja Utama** : Meningkatnya kontribusi *share* sektor industri terhadap total PDRB di Wilayah Jawa

Tabel 19. Capaian IKU IX dari Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri di wilayah Jawa dan Bali

Sasaran Strategis	IKU	2014			2015		
		T	R	Capaian (%)	T	R	Capaian (%)
Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri di Wilayah Jawa dan Bali	Meningkatnya <i>share</i> sektor industri terhadap total PDRB di Wilayah Jawa				25,35%	29,09%	114,75%
Nilai Capaian Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri di Wilayah Jawa dan Bali)							114,75%

Target yang ditetapkan pada tahun 2015 adalah 0,15 persen, sementara realisasinya adalah 114,75 persen. Perhitungan *share* sektor industri tahun 2015 terhadap total PDRB menggunakan data pada tahun 2014 dengan tahun dasar 2010, hal ini dikarenakan adanya *time lag* selama 1 tahun di tahun 2015. Angka ini digunakan sebagai proyeksi untuk kondisi pada tahun 2015. Diperkirakan sampai dengan akhir tahun 2015, *share* sektor industri manufaktur tersebut tidak akan banyak mengalami perubahan.

- j) **Indikator Kinerja Utama** : Meningkatnya kontribusi *share* sektor industri terhadap total PDRB di Wilayah Bali

Tabel 20. Capaian IKU X dari Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri di wilayah Jawa dan Bali

Sasaran Strategis	IKU	2014			2015		
		T	R	Capaian (%)	T	R	Capaian (%)
Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri di Wilayah Jawa dan Bali	Meningkatnya <i>share</i> sektor industri terhadap total PDRB di Wilayah Bali				8,85%	6,38%	72,09%
Nilai Capaian Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri di Wilayah Jawa dan Bali)							72,09%

Target yang ditetapkan pada tahun 2015 adalah 8,85 persen, sementara realisasinya adalah 6,38 persen. Perhitungan *share* sektor industri tahun 2015 terhadap total PDRB menggunakan data pada tahun 2014 dengan tahun dasar 2010, hal ini dikarenakan adanya *time lag* selama 1 tahun di tahun 2015. Angka ini digunakan sebagai proyeksi untuk kondisi pada tahun 2015. Diperkirakan sampai dengan akhir tahun 2015, *share* sektor industri manufaktur tersebut tidak akan banyak mengalami perubahan.

Share sektor industri manufaktur di Jawa terhadap total nilai tambah sektor industri nasional melebihi target, hal ini menunjukkan pertumbuhan sektor industri manufaktur nasional masih didominasi oleh Pulau Jawa. Kondisi ini disebabkan oleh faktor-faktor di luar Jawa seperti infrastruktur yang belum memadai, keterbatasan energi seperti gas dan listrik dan ketersediaan tenaga kerja yang kompeten sehingga menyebabkan investasi-investasi baru khususnya di sektor industri manufaktur masih lebih banyak memilih untuk berlokasi di Pulau Jawa.

Meskipun demikian, dalam 3 tahun terakhir menunjukkan adanya kecenderungan meningkatnya peranan sektor industri pengolahan di luar Pulau Jawa sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini. Kondisi yang diharapkan adalah secara perlahan-lahan kontribusi sektor industri manufaktur di luar Pulau Jawa meningkat sehingga dalam jangka panjang yaitu pada tahun 2035 kontribusinya menjadi sekitar 40 persen.

Tabel 21. Share Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB di Wilayah II

(Dalam Persen)

Wilayah	2010	2011	2012	2013	2014
Jawa	29,32	29,64	29,35	29,18	29,09
Bali	7,00	6,69	6,53	6,44	6,38

Sumber : BPS (Diolah Ditjen PPI, Kemenperin, 2015)

2. Tumbuh dan berkembangnya Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) di Wilayah Jawa dan Bali

Sesuai dengan Penetapan Kinerja, sasaran program/kegiatan yang akan dicapai Direktorat Pengembangan Fasilitas Industri Wilayah II dalam rangka tumbuh dan berkembangnya Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) di Wilayah Jawa dan Bali diukur melalui indikator kinerja utama tersusunnya masterplan pengembangan WPPI.

Adapun realisasi, target serta capaian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 22. Capaian IKU dari Tumbuh dan Berkembangnya Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) di Wilayah Jawa dan Bali

Sasaran Program/Kegiatan	IKU	2014			2015		
		T	R	Capaian (%)	T	R	Capaian (%)
Tumbuh dan berkembangnya Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) di Wilayah Jawa dan Bali	Tersusunnya Masterplan Pengembangan WPPI	-	-	-	4 Prov.	4 Prov.	100
Nilai Capaian Tumbuh dan Berkembangnya Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) di Wilayah Jawa dan Bali							100

UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian mengamanatkan tentang Perwilayahan Industri untuk percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri di seluruh wilayah NKRI. Penyebaran pembangunan industri yang maju sebagai motor penggerak ekonomi didukung oleh struktur industri yang mandiri, sehat dan berdaya saing dengan mendayagunakan sumber daya secara optimal dan efisien, serta mendorong perkembangan industri ke seluruh wilayah Indonesia dalam kerangka menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Mengingat daya dukung pulau Jawa yang terbatas, serta potensi peran industri sebagai motor penggerak ekonomi, maka penyebaran dan pemerataan pembangunan industri merupakan agenda penting dalam mewujudkan struktur ekonomi nasional yang kokoh dan seimbang. Sejalan dengan amanat Undang-undang di atas, Kementerian Perindustrian akan terus berupaya untuk melakukan pemerataan dan penyebaran industri ke seluruh wilayah Indonesia. Untuk Pulau Jawa dimana sebagian besar aktivitas sektor industri nasional berlokasi, maka perlu dilakukan penataan agar industri di Pulau Jawa tetap dapat berdaya saing dan efektif dalam penggunaan sumber daya yang ada.

Sesuai dengan amanat Pasal 14 UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pembangunan Industri melalui Perwilayahan Industri yang dilaksanakan melalui : pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI), pembangunan Kawasan Industri (KI), dan pengembangan Sentra Industri kecil dan Industri Menengah (SIKIM).

Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) merupakan wilayah yang dirancang dengan pola berbasis pengembangan industri dengan pendayagunaan potensi sumberdaya wilayah melalui penguatan infrastruktur industri dan konektivitas yang memiliki keterkaitan ekonomi kuat.

Pada tahun 2015, Direktorat Pengembangan Perwilayahan Industri Wilayah II memiliki sasaran program/kegiatan berupa tumbuh dan berkembangnya Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) di Wilayah Jawa dan Bali, yang memiliki indikator kinerja berupa tersusunnya masterplan pengembangan WPPI di beberapa

daerah, yaitu :

a. Penyusunan Masterplan Pengembangan WPPI di Banten dan Jawa Tengah

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut terhadap kebijakan Kementerian Perindustrian untuk mendorong pusat-pusat pertumbuhan industri di Indonesia. Penyusunan masterplan pengembangan WPPI bertujuan agar Pemerintah memiliki pedoman dalam pengembangan wilayah pertumbuhan industri dan acuan dalam pengembangan spasial industri di daerah baik dalam bentuk KPI, KI dan Sentra IKM.

Provinsi Banten dan Jawa Tengah merupakan 2 (dua) provinsi yang aktivitas industrinya cukup besar. Penyusunan masterplan pengembangan WPPI di Provinsi Banten dan Jawa Tengah dilakukan di Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri, yaitu di Provinsi Banten yang meliputi Kota Cilegon, Kab./Kota Serang, Kab./Kota Tangerang serta Provinsi Jawa Tengah yang meliputi Kab. Kendal, Kab./Kota Semarang, dan Kab. Demak.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk kajian yang meliputi analisa spasial dan tata ruang, analisa kebutuhan infrastruktur dan sarana pendukung pengembangan WPPI, analisa sektor industri, analisa sistem logistik, analisa kebijakan publik, analisa ekologi dan analisa perencanaan strategis dan rencana aksi untuk mendukung implementasi pengembangan WPPI.

Implementasi kegiatan ini dibantu oleh pihak ketiga (jasa konsultan) yang dilaksanakan melalui desk study, survey, pengumpulan data dan informasi terkait WPPI, kajian kebijakan sektoral dan spasial terkait perindustrian di Provinsi Banten dan Jawa Tengah, pemetaan dan kajian potensi sumberdaya wilayah yang terkait dengan sektor industri (sumber daya ekonomi, sumber daya sosial budaya, sumberdaya alam, sumber daya infrastruktur dan logistik, kelembagaan, pendanaan), FGD (*Focus Group Discussion*) dalam rangka mendapatkan masukan dari para *stakeholder* terkait sebagai penyusunan masterplan, dan penyusunan rencana induk (masterplan) pengembangan WPPI.

Adapun output yang dihasilkan adalah masterplan pengembangan WPPI di Banten dan Jawa Tengah yang berisi :

- Rencana Pengembangan WPPI di Provinsi Banten dan Jawa Tengah dalam rangka pengembangan pusat pertumbuhan industri (indikasi lokasi Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Industri dan Sentra IKM dan arah pengembangan industri);
- Rencana pengembangan dan penyediaan kebutuhan infrastruktur baik fisik maupun non fisik dalam pengembangan WPPI Banten dan Jawa Tengah (transportasi/logistik, sarana pendukung (air, listrik, energi, telekomunikasi) dan sumber daya manusia).
- Rencana strategis pengembangan WPPI Provinsi Banten dan Jawa Tengah (kebijakan, strategi dan program dalam pengembangan WPPI)
- Rencana aksi pengembangan WPPI (kelembagaan, pentahapan, program dan pendanaan).

Secara umum pelaksanaan seluruh kegiatan ini berjalan lancar dan output yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan. Rencana tindak lanjut ke depan yang perlu dilakukan adalah menyampaikan dokumen masterplan yang telah disusun kepada stakeholder di daerah dan menyiapkan kegiatan fasilitasi pembangunan infrastruktur.

b. Penyusunan Masterplan Pengembangan WPPI di Jawa Barat dan Jawa Timur

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyusun masterplan pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) di Jawa Barat dan Jawa Timur termasuk Rencana Strategis dan Rencana Aksi untuk pengembangan WPPI, yang bertujuan sebagai pedoman dalam pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri.

Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat merupakan dua wilayah utama pengembangan industri di Indonesia. Sebagian besar aktivitas sektor industri nasional berlokasi di kedua provinsi ini, sehingga sangat sesuai dijadikan lokasi WPPI. Penyusunan masterplan pengembangan WPPI di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur dilakukan di Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri, yaitu di Provinsi

Jawa Timur yang meliputi Kab. Gresik, Kab. Bangkalan, Kab. Mojokerto, Kota Surabaya, Kab. Sidoarjo, Kab. Tuban dan Kab. Lamongan serta Provinsi Jawa Barat yang meliputi wilayah Kab./Kota Bekasi, Kab./Kota Bogor, Kab. Karawang, Kab. Purwakarta, Kab. Subang, Kab. Cirebon, Kab. Indramayu dan Kab. Majalengka.

Implementasi kegiatan ini dibantu oleh pihak ketiga (jasa konsultan) yang dilaksanakan melalui desk study, survey, pengumpulan data dan informasi terkait WPPI, pemetaan data dan informasi terkait dengan masalah ekonomi, industri, investasi, perdagangan, infrastruktur dan logistik, sumber daya serta perwilayahan di Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat, FGD atau rapat teknis dalam rangka mendapatkan masukan dari para stakeholder terkait penyusunan rencana induk, serta penyusunan rencana induk pengembangan WPPI (masterplan, rencana strategis, rencana aksi dan rencana pengembangan infrastruktur).

Keluaran (output) dari kegiatan ini adalah laporan pengembangan WPPI yang berisi :

- Rencana Induk (Masterplan) Pengembangan WPPI di Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat dalam rangka pengembangan pusat pertumbuhan industri untuk masing-masing WPPI;
- Rencana Strategis dan Rencana Aksi Pengembangan WPPI Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat;
- Kebutuhan infrastruktur baik fisik maupun non fisik dalam pengembangan wilayah Jawa Timur dan Jawa Barat dalam pengembangan pusat-pusat pertumbuhan industri di masing-masing WPPI.

Secara umum pelaksanaan seluruh kegiatan ini berjalan lancar dan output yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan. Rencana tindak lanjut ke depan yang perlu dilakukan adalah menyampaikan dokumen masterplan yang telah disusun kepada stakeholder di daerah dan menyiapkan kegiatan fasilitasi pembangunan infrastruktur.

2. Tumbuh dan Berkembangnya Kawasan Industri di Wilayah Jawa dan Bali

Sesuai dengan Penetapan Kinerja, sasaran program/kegiatan yang akan dicapai Direktorat Pengembangan Fasilitas Industri Wilayah II dalam rangka tumbuh dan berkembangnya Kawasan Industri di Wilayah Jawa dan Bali diukur melalui indikator kinerja utama terfasilitasinya kawasan industri dalam penyusunan kajian dan dokumen perencanaan pembangunan.

Adapun realisasi, target serta capaian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 23. Capaian IKU dari Tumbuh dan Berkembangnya Kawasan Industri di Wilayah Jawa dan Bali

Sasaran Program/Kegiatan	IKU	2014			2015		
		T	R	Capaian (%)	T	R	Capaian (%)
Tumbuh dan berkembangnya Kawasan Industri di Wilayah Jawa dan Bali	Terfasilitasinya kawasan industri dalam penyusunan kajian dan dokumen perencanaan pembangunan	-	-	-	2 KI	2 KI	100
Nilai Capaian Tumbuh dan Berkembangnya Kawasan Industri di Wilayah Jawa dan Bali							100

Dalam pengembangan perwilayahan industri sebagaimana pada pasal 14 dari Undang-undang No. 3 Tahun 2014 disebutkan peran Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melakukan percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia melalui perwilayahan industri. Perwilayahan industri dimaksud dilaksanakan melalui pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri, pengembangan kawasan peruntukan industri, pembangunan kawasan industri dan pengembangan sentra industri kecil dan industri menengah.

Pada tahun 2015, Direktorat Pengembangan Perwilayahan Industri Wilayah II melakukan fasilitasi perencanaan pembangunan kawasan industri di beberapa daerah, yaitu :

a. Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Kawasan Industri di Jawa (Banyuwangi dan Majalengka) dan Madura (Bangkalan)

Sesuai dengan amanat undang-undang, setiap perusahaan industri baru wajib masuk ke dalam kawasan industri dengan pertimbangan agar industri yang dibangun berada dalam tata ruang yang tepat dan benar, ramah lingkungan, pengelolaan yang efektif dan efisien serta memudahkan dalam perencanaan dan pengadaan infrastruktur pendukung. Adapun dampak yang diharapkan dalam pembangunan kawasan industri antara lain memberikan kemudahan bagi dunia usaha untuk memperoleh kavling industri siap bangun yang sudah dilengkapi dengan infrastruktur yang memadai, memberikan kepastian hukum lokasi tempat usaha sehingga terhindar dari segala bentuk gangguan dan diperolehnya rasa aman bagi dunia usaha, dan mengatasi permasalahan tata ruang sekaligus mengendalikan masalah dampak lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan industri. Implementasi kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk sub kegiatan :

1. Penyusunan dokumen DED KI Banyuwangi dan Masterplan KI Bangkalan
2. Penyusunan Dokumen Masterplan Kawasan Industri di Majalengka

Deskripsi masing-masing sub kegiatan dijabarkan sebagai berikut:

- (1). Penyusunan Dokumen DED KI Banyuwangi dan Masterplan KI Bangkalan dimaksudkan agar kawasan industri serta lingkungannya tertata dengan baik dengan kelengkapan sarana dan prasarana dan memperhatikan dampak lingkungan. Pelaksanaan kegiatan ini dibantu oleh pihak ketiga (jasa konsultan) melalui desk study, survey, penyusunan desain fisik, kajian wilayah dan topografi serta struktur ruang, kajian industri yang akan menjadi penggerak kawasan industri, FGD dengan stakeholder terkait, konsultasi publik, penyusunan album gambar (bestek) yang memuat gambar rancangan, detail rancangan dan gambar konstruksi, penyusunan dokumen rencana anggaran biaya (termasuk analisa kelayakan finansial) dan analisa rinci spesifikasi teknis, kelembagaan serta menyusun siteplan.

Pihak ketiga bertugas membuat suatu dokumen perencanaan teknis yang lengkap sehingga ada satu dokumen kegiatan Perencanaan Teknis (DED) pembangunan kawasan industri Banyuwangi dan satu dokumen masterplan kawasan industri Bangkalan, dimana penyusunan dokumen ini bertujuan

sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan fisik di lapangan sehingga diperoleh efisiensi dan efektifitas dan bangunan yang handal.

Pembangunan kawasan industri diawali dengan Pra FS, penyusunan Masterplan, hingga pada tahap pembangunan dengan mengacu pada rencana detail kawasan yang dituangkan dalam rencana Detailed Engineering Design. Detail Engineering Design (DED), merupakan tahap pengembangan perencanaan, dilakukan penyempurnaan analisa elemen struktur sehingga diperoleh suatu konfigurasi struktur yang baik dari segi kekuatan, kestabilan, keamanan dan ekonomis. Dengan demikian dapat diperoleh suatu desain struktur bangunan yang optimal.

Sasaran dalam penyusunan DED kawasan industri Banyuwangi yang diinginkan dalam kegiatan ini antara lain:

- a. Penyusunan Desain Fisik Rancangan Desain Tata Letak dan Petunjuk Desain Fisik, Gambar Rancangan, Detail Rancangan dan Gambar Konstruksi
- b. Menyusun dokumen Rencana Anggaran Biaya dan Analisa Rinci Spesifikasi Teknis
- c. Menyusun dokumen Rencana Kerja dan Syarat

Sedangkan sasaran untuk penyusunan masterplan kawasan industri Bangkalan antara lain, yaitu:

- a. Penyusunan Masterplan dan fokus industri Kawasan Industri Bangkalan
- b. Penyusunan Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana
- c. Penyusunan Rencana Pembangunan dan Analisis Kelayakan Ekonomi dan Finansial
- d. Analisis Kelembagaan pembangunan dan pengelolaan kawasan industri Banyuwangi

(2). Penyusunan Dokumen Masterplan Kawasan Industri di Majalengka bertujuan untuk membantu pengembangan industri di Kabupaten Majalengka melalui rencana pembangunan kawasan industri. Provinsi Jawa barat merupakan provinsi yang memiliki daerah yang sangat potensial dijadikan kawasan pertumbuhan ekonomi baru, salah satunya Kabupaten

Majalengka. Dengan adanya mega proyek Bandara Internasional Jabar (BIJB) di Kertajati, tentunya akan menjadikan Majalengka sebagai pusat pertumbuhan baru di Jawa Barat bagian timur.

Salah satu syarat dalam pembangunan kawasan industri adalah persyaratan dokumen perencanaan kawasan, yang salah satunya berupa masterplan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyusun rencana masterplan kawasan industri di Kabupaten Majalengka.

Implementasi kegiatan ini dibantu oleh pihak ketiga yang bertugas menganalisis kesesuaian lokasi peruntukan kawasan industri, melakukan kajian wilayah dan topografi tanah, menganalisa struktur ruang, mengkaji industri yang akan menjadi penggerak kawasan industri, menyusun konsep pengembangan kawasan industri, menyusun rencana zoning dan besaran perbandingan lahan, menyusun rencana pengembangan infrastruktur atau sarana/prasarana, menyusun site plan kawasan industri, menganalisa kelayakan finansial serta kelembagaannya.

Secara umum pelaksanaan seluruh kegiatan ini berjalan lancar dan output yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan. Rencana tindak lanjut ke depan yang perlu dilakukan adalah menyampaikan dokumen perencanaan pembangunan kawasan industri tersebut kepada stakeholder yang terkait.

b. Fasilitasi Pengembangan Kawasan Industri di Jawa (Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur)

Kawasan industri di Indonesia berkembang sekitar awal tahun 1970an yang merupakan inisiasi dari pemerintah pusat. Di tahun 1990an, pemerintah membuka pintu investasi di kawasan industri untuk sector swasta dan sejak saat itu kawasan industri bermunculan satu persatu dan tumbuh dengan pesat. Saat krisis ekonomi akhir 1990an, banyak kawasan industri yang mati suri, kawasan industri tersebut mulai hidup lagi di pertengahan tahun 2000an seiring dengan semakin baiknya pertumbuhan ekonomi.

Dengan pesatnya pertumbuhan kawasan industri saat ini, beragam permasalahan pun muncul. Kawasan industri menghadapi banyak permasalahan dalam operasionalnya seperti terkait lahan, tata ruang, kebijakan, lingkungan,

infrastruktur, social budaya dan sebagainya. Direktorat Fasilitas Industri Wilayah II bermaksud untuk menata kawasan-kawasan industri sekaligus mengidentifikasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi dan menyusun strategi dalam upaya penataan dan pengembangan kawasan industri di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Implementasi kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk sub kegiatan :

- (1) Penyusunan kajian penataan kawasan industri di Jawa Barat dan Jawa Tengah
- (2) Penyusunan kajian penataan kawasan industri di Jawa Timur

Deskripsi masing-masing sub kegiatan dijabarkan sebagai berikut:

- (1) Penyusunan kajian penataan kawasan industri di Jawa Barat dan Jawa Tengah bertujuan untuk menyusun rencana penataan dan pengembangan kawasan industri di Jawa Barat dan Jawa Tengah yang meliputi Provinsi Jawa Barat (Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta), serta Provinsi Jawa Tengah (Kota Semarang dan Kabupaten Demak). Pelaksanaan kegiatan ini dibantu oleh pihak ketiga melalui koordinasi, survey, pengumpulan dan pengolahan data serta analisis dengan output yang diharapkan berupa dokumen program dan bentuk penataan KI di Provinsi Jawa Tengah, dokumen program dan bentuk penataan KI Provinsi Jawa Barat dan dokumen program dan bentuk penataan KI di masing-masing kabupaten/kota wilayah studi yang di dalamnya mencakup analisa karakteristik industri eksisting, analisa kesesuaian kawasan industri/zona industri eksisting, analisa kinerja infrastruktur pendukung kawasan industri, review tata ruang wilayah dan peraturan terkait pengembangan kawasan industri, identifikasi dan analisa permasalahan dan hambatan yang dihadapi selama pengembangan kawasan industri, analisa kondisi kawasan industri, tantangan dan hambatan pengembangan kawasan industri di masa akan datang, analisa kelayakan pengembangan kawasan industri, penyusunan peta rencana penataan dan pengembangan kawasan industri, rencana kebutuhan infrastruktur pendukung kawasan industri serta penyusunan strategi penataan kawasan industri di wilayah studi.

(2) Penyusunan kajian penataan kawasan industri di Jawa Timur bertujuan untuk menyusun rencana penataan dan pengembangan kawasan industri di Provinsi Jawa Timur yang meliputi Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Mojokerto. Implementasi kegiatan ini dibantu oleh pihak ketiga yang melakukan identifikasi dan analisis karakteristik kawasan industri eksisting di wilayah studi, identifikasi dan analisis kesesuaian wilayah studi dengan pedoman pengembangan kawasan industri, identifikasi dan analisis kinerja infrastruktur pendukung kawasan industri, review rencana tata ruang wilayah dan peraturan terkait pengembangan kawasan industri, identifikasi dan analisis permasalahan, tantangan dan hambatan pengembangan kawasan industri, analisis kelayakan pengembangan kawasan industri, penyusunan peta rencana penataan dan pengembangan kawasan industri, penyusunan rencana kebutuhan infrastruktur pendukung kawasan industri dan penyusunan strategi penataan kawasan industri di wilayah studi.

Secara umum pelaksanaan seluruh kegiatan ini berjalan lancar dan output yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan. Rencana tindak lanjut ke depan yang perlu dilakukan adalah menyampaikan dokumen perencanaan pembangunan kawasan industri yang telah disusun tersebut kepada stakeholder di daerah untuk dijadikan rekomendasi penataan dan pengembangan kawasan industri.

3. Tumbuhnya Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (SIKM) di Wilayah Jawa dan Bali

Sesuai dengan Penetapan Kinerja, sasaran program/kegiatan yang akan dicapai Direktorat Pengembangan Fasilitas Industri Wilayah II dalam rangka tumbuhnya sentra industri kecil dan menengah (SIKM) di Wilayah Jawa dan Bali diukur melalui indikator kinerja utama terfasilitasinya sentra IKM dalam penyusunan rencana pembangunan. Adapun realisasi, target serta capaian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 24. Capaian IKU dari Tumbuhnya Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah di Wilayah Jawa dan Bali

Sasaran Program/Kegiatan	IKU	2014			2015		
		T	R	Capaian (%)	T	R	Capaian (%)
Tumbuhnya Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (SKIM) di Wilayah Jawa dan Bali	Terfasilitasinya sentra IKM dalam penyusunan rencana pembangunan	-	-	-	3 SKIM	3 SKIM	100
Nilai Capaian Tumbuhnya Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (SKIM) di Wilayah Jawa dan Bali							100

Dalam pengembangan perwilayahan industri sebagaimana pada pasal 14 dari Undang-undang No. 3 Tahun 2014 disebutkan peran Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melakukan percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia melalui perwilayahan industri. Perwilayahan industri dimaksud dilaksanakan melalui pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri, pengembangan kawasan peruntukan industri, pembangunan kawasan industri dan pengembangan sentra industri kecil dan industri menengah.

Peran industri kecil dan menengah dalam pembangunan industri nasional sangat besar dan penyebarannya hampir merata disemua daerah, namun sebagian besar kegiatan industrinya belum tersentralisasi di satu lokasi. Hal ini antara lain berdampak kepada timbulnya masalah lingkungan dan terbatasnya dukungan infrastruktur. Sehingga Pada tahun 2015, Direktorat PFI Wilayah 2 akan memfasilitasi Perencanaan Pengembangan Sentra Industri Kecil Menengah di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat yang diharapkan dapat menjadi sentra yang bermanfaat dan berdaya saing.

Pada tahun 2015, Direktorat Pengembangan Perwilayahan Industri Wilayah II melakukan fasilitasi sentra IKM dalam penyusunan rencana pembangunan di beberapa daerah, yaitu :

a. Penyusunan Pola Pengembangan Sentra IKM di Jawa Tengah dan Jawa Timur

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari amanat Undang-Undang No.3 Tahun 2014 untuk melakukan percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia melalui perwilayahan industri. Bagi kabupaten/kota yang tidak memungkinkan dibangun kawasan industri karena tidak layak secara teknis dan ekonomis, maka pembangunan industri dilakukan melalui pengembangan Sentra IKM yang perlu diarahkan untuk mendukung industri besar sehingga perlu dikaitkan dengan pengembangan WPPI, maupun sentra IKM yang mandiri yang menghasilkan nilai tambah serta menyerap tenaga kerja. Pengembangan sentra IKM diarahkan pada kabupaten/kota yang telah memiliki Kompetensi Inti Industri Daerah (KIID).

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk sub kegiatan, yaitu :

- (1). Kajian pola pengembangan sentra IKM di Jawa Tengah
- (2) Kajian pola pengembangan sentra IKM di Jawa Timur

Deskripsi masing-masing sub kegiatan dijabarkan sebagai berikut :

- (1). Kajian pola pengembangan sentra IKM di Jawa Tengah bertujuan untuk menyusun pola pengembangan sentra industri Kabupaten/Kota wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Kota Pekalongan, Kota Solo dan Kabupaten Jepara. Kegiatan ini dilaksanakan dengan bantuan pihak ketiga dengan melakukan koordinasi, survey, pengumpulan dan pengolahan data dan FGD di daerah untuk menghimpun data serta masukan dari *stakeholder* terkait. Adapun output yang dihasilkan adalah dokumen kajian pola pengembangan sentra industri kabupaten/kota di Jawa Tengah yang mencakup didalamnya analisis konsep dan rencana pengembangan sentra IKM, review dan analisis kinerja Sentra IKM eksisting, identifikasi dan analisis permasalahan pengembangan Sentra IKM, identifikasi dan analisis potensi pengembangan Sentra IKM, identifikasi dan analisis kebutuhan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pendukung sentra IKM, identifikasi dan analisis kelembagaan sentra IKM, serta rencana penguatan kelembagaan sentra IKM di wilayah studi.

(2). Kajian pola pengembangan sentra IKM di Jawa Timur bertujuan untuk menyusun pola pengembangan sentra industri di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur (Kabupaten Bangkalan). Kegiatan ini dilaksanakan dengan bantuan pihak ketiga dengan melakukan koordinasi, survey, pengumpulan dan pengolahan data dan FGD di daerah untuk menghimpun data serta masukan dari *stakeholder* terkait. Adapun output yang dihasilkan adalah dokumen masterplan pengembangan sentra IKM di Bangkalan yang mencakup di dalamnya analisa kesesuaian lokasi peruntukan sentra IKM, kajian wilayah dan topografi, analisa struktur ruang, kajian industri yang akan menjadi penggerak sentra IKM, konsep pengembangan sentra IKM, perencanaan zoning dan besaran perbandingan lahan, rencana pengembangan infrastruktur atau sarana/prasarana pendukung sentra IKM, site plan lokasi peruntukan sentra IKM di wilayah studi, analisa kelayakan finansial, ekonomi, sosial dan lingkungan, serta analisa bussines plan perencanaan pembangunan sentra IKM di wilayah studi.

Secara umum pelaksanaan seluruh kegiatan ini berjalan lancar dan output yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan. Rencana tindak lanjut ke depan adalah menyampaikan dokumen kajian pola pengembangan sentra IKM di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah kepada stakeholder di daerah untuk dijadikan bahan rekomendasi pengembangan Sentra IKM di wilayah tersebut. Sementara itu, rencana tindak lanjut untuk penyusunan masterplan pengembangan Sentra IKM di Provinsi Jawa Timur adalah perencanaan konstruksi (DED) Sentra IKM di Kabupaten Bangkalan.

b. Penyusunan Pola Pengembangan Sentra IKM di Jawa Barat

Sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang No.3 Tahun 2014 untuk melakukan percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia melalui perwilayahan industri, maka untuk mendukung hal tersebut, Direktorat PFI Wilayah II melakukan penyusunan masterplan pengembangan sentra IKM di Jawa Barat. Melalui penyusunan Masterplan Sentra IKM ini, Kementerian Perindustrian bermaksud mendapatkan model pengembangan Sentra IKM yang khas di Jawa Barat

khususnya di Kab. Majalengka serta dapat menjadi model rujukan pengembangan Sentra IKM di daerah se-Jawa Barat dan daerah lainnya di Indonesia.

Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun model pola pengembangan sentra industri kecil dan menengah di Jawa Barat melalui penyusunan masterplan sentra IKM di Kabupaten Majalengka. Implementasi kegiatan ini dibantu oleh pihak ketiga (jasa konsultan) melalui rapat koordinasi, survey, pengumpulan dan pengolahan data serta analisis. Output yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah dokumen masterplan pengembangan sentra IKM di Kabupaten Majalengka yang di dalamnya mencakup analisa kesesuaian lokasi peruntukan sentra IKM, kajian wilayah dan topografi, analisa struktur ruang, kajian industri yang akan menjadi penggerak sentra IKM, konsep pengembangan sentra IKM di Kabupaten Majalengka, perencanaan zoning dan besaran perbandingan lahan, penyusunan rencana pengembangan infrastruktur atau sarana/prasarana, penyusunan site plan, analisa kondisi lingkungan wilayah studi, analisa kelayakan finansial, penyusunan bussines plan dan analisa kelembagaan (pengelola sentra IKM).

Secara umum pelaksanaan kegiatan ini berjalan lancar dan output yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan. Rencana tindak lanjut ke depan yang perlu dilakukan adalah menyampaikan dokumen pola pengembangan sentra IKM yang telah disusun kepada stakeholder di daerah serta melanjutkan koordinasi, monitoring dan evaluasi pembangunan sentra IKM yang direncanakan melalui mekanisme DAK.

c. Fasilitasi Rencana Pembangunan Kawasan Industri Kecil/Sentra di Jawa Timur (*refocussing*)

Kegiatan ini tidak dilaksanakan karena keterbatasan waktu pelaksanaan dalam TA 2015 akibat adanya perubahan anggaran yang baru di sah kan pada pertengahan tahun, sementara kegiatan ini harus diawali dengan proses lelang pihak ketiga yang memakan waktu \pm 2 bulan.

4. Berkembangnya Industri di Daerah melalui Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi/Kabupaten/Kota di Wilayah Jawa dan Bali

Sesuai dengan Penetapan Kinerja, sasaran program/kegiatan yang akan dicapai Direktorat Pengembangan Fasilitas Industri Wilayah II dalam rangka berkembangnya industri di daerah melalui penyusunan rencana pembangunan industri provinsi/kabupaten/kota di wilayah Jawa dan Bali diukur melalui indikator kinerja utama terfasilitasinya penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi/Kabupaten/Kota. Adapun realisasi, target serta capaian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 25. Capaian IKU dari Berkembangnya Industri di Daerah melalui Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi/Kabupaten/Kota di Wilayah Jawa dan Bali

Sasaran Program/Kegiatan	IKU	2014			2015		
		T	R	Capaian (%)	T	R	Capaian (%)
Berkembangnya industri di daerah melalui penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi/Kabupaten/Kota di Wilayah Jawa dan Bali	Terfasilitasinya penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi/Kabupaten/Kota	-	-	-	16 daerah	16 daerah	100
Nilai Capaian Berkembangnya Industri di Daerah melalui Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi/Kabupaten/Kota di Wilayah Jawa dan Bali							100

Sebagai pengungkit dan pendorong pembangunan ekonomi, sektor industri Industri memerlukan berbagai dukungan dalam bentuk perangkat kebijakan yang tepat, perencanaan yang terpadu, dan pengelolaan yang efisien dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Sejak tahun 2004, terjadi perubahan internal yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu dengan diberlakukan Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah yang membawa konsekuensi meningkatnya peran dan kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam perumusan Kebijakan Sektor Industri. Apabila dilihat secara makro, hal ini seringkali membawa ketidak efektifan dalam penyelenggaraan kegiatan industri

secara nasional. Banyaknya pemegang kewenangan sektoral dan regional sering kali memberi dampak tidak efisiennya pemanfaatan sumber daya sektor industri karena semua pihak berupaya untuk menggunakan sumber daya yang ada untuk kepentingannya masing-masing.

Untuk itu, diperlukan suatu Peran Pemerintah pusat dalam mensinergikan kebijakan pembangunan industri di daerah (Provinsi dan Kabupaten). Pada tahun 2015, Direktorat Pengembangan Perwilayahan Industri Wilayah II melakukan fasilitasi penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi/Kabupaten/Kota di beberapa daerah, yaitu :

a. Fasilitasi Penyusunan Rencana Pengembangan Industri Provinsi di DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat

Sebagaimana yang diamanatkan oleh UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Bab III pada Pasal 10 dan Pasal 11 yang menyatakan bahwa setiap Kepala Daerah menyusun Rencana Pembangunan Industri Daerah dengan memperhatikan potensi sumber daya industri daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah, serta keserasian dan keseimbangan dengan kebijakan pembangunan industri di daerah, sehingga Direktorat PFI Wilayah II melakukan fasilitasi penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi di DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan bimbingan teknis bagi provinsi dalam Penyusunan Rencana Pengembangan Industri Provinsi, yang bertujuan agar terjadi keselarasan Rencana Pengembangan Industri Provinsi dengan Rencana Pengembangan Industri Nasional. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk swakelola dengan melibatkan narasumber yang kompeten melalui koordinasi, FGD/rapat teknis untuk menghimpun data dan informasi yang nantinya akan diolah oleh tenaga ahli yang berkompeten serta dilakukan bimbingan teknis penyusunan Rencana Pengembangan Industri Provinsi kepada Tim penyusunan Rencana Pengembangan Industri Provinsi yang telah dibentuk yang terdiri dari berbagai unsur SKPD terkait di masing-masing provinsi. Output dari kegiatan ini yang diharapkan adalah draft penyusunan Rencana Pengembangan Industri Provinsi berbasis keunggulan lokal yang telah disusun oleh Tenaga Ahli dapat dijadikan sebagai rekomendasi bagi Tim di daerah untuk

menyusun Rencana Pembangunan Industri Provinsi di wilayah mereka. Secara umum kegiatan ini berlangsung dengan lancar dan mencapai output yang ditetapkan.

b. Fasilitasi Penyusunan Rencana Pengembangan Industri Provinsi di Jawa Tengah, D.I.Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali

Direktorat PFI Wilayah II melakukan fasilitasi penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi di Jawa Tengah, D.I.Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan bimbingan teknis bagi provinsi dalam Penyusunan Rencana Pengembangan Industri Provinsi, yang bertujuan agar terjadi keselarasan Rencana Pengembangan Industri Provinsi dengan Rencana Pengembangan Industri Nasional. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk swakelola dengan melibatkan narasumber yang kompeten melalui koordinasi, FGD/rapat teknis untuk menghimpun data dan informasi yang nantinya akan diolah oleh tenaga ahli yang berkompeten serta dilakukan bimbingan teknis penyusunan Rencana Pengembangan Industri Provinsi kepada Tim penyusunan Rencana Pengembangan Industri Provinsi yang telah dibentuk yang terdiri dari berbagai unsur SKPD terkait di masing-masing provinsi. Output dari kegiatan ini yang diharapkan adalah draft penyusunan Rencana Pengembangan Industri Provinsi berbasis keunggulan lokal yang telah disusun oleh Tenaga Ahli dapat dijadikan sebagai rekomendasi bagi Tim di daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Industri Provinsi di wilayah mereka. Secara umum kegiatan ini berlangsung dengan lancar dan mencapai output yang ditetapkan.

c. Fasilitasi Penyusunan Rencana Pengembangan Industri Kabupaten di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur

Pada tahun 2015, Direktorat Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah II melaksanakan kegiatan Fasilitasi Penyusunan Rencana Pengembangan Industri Kabupaten di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai upaya untuk memberikan arah pengembangan industri di daerah sehingga selaras dengan Kebijakan Industri Nasional. Daerah yang difasilitasi adalah daerah yang

termasuk ke dalam daerah tertinggal atau daerah dengan kondisi pertumbuhan industri yang belum besar. Rancangan yang disusun dari kegiatan ini akan dijadikan sebagai materi teknis untuk bahan draft lampiran Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota. Kegiatan ini dilaksanakan dalam dua sub kegiatan, yaitu :

- (1). Penyusunan Rencana Pembangunan Industri kabupaten/Kota di Banten dan Jawa Timur
- (2) Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota di Jawa Barat dan Jawa Tengah

Deskripsi masing-masing sub kegiatan dijabarkan sebagai berikut :

- (1). Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota di Banten dan Jawa Timur bertujuan untuk membantu Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten yang akan dijadikan sebagai bahan masukan dalam draft Peraturan Daerah. Kegiatan ini dilaksanakan di 5 Kabupaten yaitu Provinsi Banten 2 (dua) Kabupaten (Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak), dan 3 (tiga) Kabupaten di Provinsi Jawa Timur (Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Pamekasan). Pelaksanaan kegiatan ini dibantu oleh pihak ketiga (jasa konsultan) dengan melakukan survey, pengumpulan data dan informasi serta melakukan analisis, dimana output yang diharapkan dari kegiatan ini merupakan Rancangan Bahan Masukan Draft Lampiran Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten, yang di dalamnya mencakup kajian terhadap kebijakan dan peraturan yang ada serta studi terdahulu sebagai dasar program pembangunan industri; identifikasi potensi pembangunan industri dari sisi keunggulan SDA, industri prioritas dan kompetensi SDM; identifikasi rencana pengembangan industri dan sarana prasarana pendukung industri seperti infrastruktur; review kajian kompetensi inti industri Kabupaten/Kota; analisa potensi dan daya saing daerah; analisa rantai nilai; analisa terhadap industri prioritas; analisa isu-isu strategis; penyusunan konsep pembangunan industri prioritas; serta penyusunan materi teknis draft lampiran Perda tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten.

(2). Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota di Jawa Barat dan Jawa Tengah bertujuan untuk membantu Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten yang akan disajikan sebagai bahan masukan dalam draft Peraturan Daerah. Kegiatan ini dilakukan di 4 Kabupaten yaitu provinsi Jawa Barat sebanyak 2 (dua) Kabupaten (Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Garut), dan 2 (dua) Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah (Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Demak). Pelaksanaan kegiatan ini dibantu oleh pihak ketiga (jasa konsultan) dengan melakukan survey, pengumpulan data dan informasi serta melakukan analisis, dimana output yang diharapkan dari kegiatan ini merupakan Rancangan Bahan Masukan Draft Lampiran Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten, yang di dalamnya mencakup kajian terhadap kebijakan dan peraturan yang ada serta studi terdahulu sebagai dasar program pembangunan industri; identifikasi potensi pembangunan industri dari sisi keunggulan SDA, industri prioritas dan kompetensi SDM; identifikasi rencana pengembangan industri dan sarana prasarana pendukung industri seperti infrastruktur; review kajian kompetensi inti industri Kabupaten/Kota; analisa potensi dan daya saing daerah; analisa rantai nilai; analisa terhadap industri prioritas; analisa isu-isu strategis; penyusunan konsep pembangunan industri prioritas; serta penyusunan materi teknis draft lampiran Perda tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten.

Secara umum pelaksanaan kegiatan ini berjalan lancar dan output yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan. Rencana tindak lanjut ke depan yang perlu dilakukan adalah menyampaikan rencana pembangunan industri kabupaten/kota yang telah disusun oleh tenaga ahli kepada pemerintah daerah sebagai materi teknis untuk bahan draft lampiran Peraturan Daerah.

5. Berkembangnya Industri di Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik di Wilayah Jawa dan Bali

Sesuai dengan Penetapan Kinerja, sasaran program/kegiatan yang akan dicapai Direktorat Pengembangan Fasilitas Industri Wilayah II dalam rangka berkembangnya industri di daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik

di wilayah Jawa dan Bali diukur melalui indikator kinerja utama terfasilitasinya industri di daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik. Adapun realisasi, target serta capaian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 26. Capaian IKU dari Berkembangnya Industri Daerah Tertinggal, terdepan, Terluar dan Pasca Konflik di Wilayah Jawa dan Bali

Sasaran Program/Kegiatan	IKU	2014			2015		
		T	R	Capaian (%)	T	R	Capaian (%)
Berkembangnya industri di daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik di wilayah Jawa dan Bali	Terfasilitasinya industri di daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik	-	-	-	4 daerah	4 daerah	100
Nilai Capaian Berkembangnya Industri di Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik di Wilayah Jawa dan Bali							100

Dalam rangka membangun daya saing industri secara berkelanjutan, maka pengembangan industri daerah yang berlandaskan potensi dan keunggulan daerah terutama di daerah tertinggal perlu diprioritaskan, sehingga sasaran pembangunan industri daerah yang salah satunya adalah untuk meningkatkan nilai tambah komoditi unggulan daerah dapat terealisasi dan dapat meningkatkan perekonomian daerah tersebut sehingga mengurangi kesenjangan antara Kabupaten/Kota. Pada tahun 2015, Direktorat Pengembangan Perwilayahan Industri Wilayah II melakukan fasilitasi industri di daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik di beberapa daerah, yaitu :

a. Fasilitasi Pengembangan Industri Unggulan Daerah Tertinggal di Kabupaten Sukabumi dan Lebak

Kegiatan ini bertujuan untuk koordinasi dengan instansi/stakeholder terkait di pusat dan daerah dalam pengembangan industri unggulan daerah tertinggal di Kabupaten Sukabumi dan Lebak serta melakukan fasilitasi pengembangan industri unggulan daerah tertinggal. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara swakelola dan menggunakan pihak ketiga, melalui rapat, koordinasi dengan daerah, diskusi, survey lapangan, pelatihan pengembangan industri unggulan,

pendampingan dan pemberian bantuan mesin peralatan. Implementasi kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk sub kegiatan :

- (1). Peningkatan Kemampuan SDM di Kabupaten Sukabumi
- (2). Peningkatan Kemampuan SDM di Kabupaten Lebak
- (3). Fasilitasi Bantuan Mesin/Peralatan

Deskripsi masing-masing sub kegiatan dijabarkan sebagai berikut:

- (1).Peningkatan Kemampuan SDM di Kabupaten Sukabumi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan SDM di bidang produksi logam dengan tujuan agar pelaku usaha dapat meningkatkan kualitas produk yang memiliki daya saing. Kegiatan ini dilakukan melalui pembelajaran (teori) dan praktek di kelas terhadap 20 peserta yang berasal dari industri logam selama 5 hari (40 JPL) dengan instruktur yang kompeten di bidangnya. Adapun output yang diharapkan adalah meningkatnya kualitas SDM di bidang industri logam di Kabupaten Sukabumi.
- (2).Peningkatan kemampuan SDM di Kabupaten Lebak bertujuan untuk meningkatkan kemampuan SDM di budang produksi gula aren dengan tujuan agar pelaku usaha dapat meningkatkan kualitas produk yang memiliki daya saing. Kegiatan ini dilakukan melalui pembelajaran (teori) dan praktek di kelas kepada 20 peserta yang berasal dari industri gula aren di Kabupaten Lebak selama 5 hari (40 JPL). Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas SDM di bidang industri gula aren di Kabupaten Lebak.
- (3). Fasilitasi bantuan mesin/peralatan yang diberikan yaitu mesin peralatan industri pengolahan logam untuk KUB di Kabupaten Sukabumi serta mesin peralatan industri pengolahan gula aren untuk KUB di Kabupaten Lebak. Pelaksana kegiatan ini adalah pihak ketiga yang ditentukan melalui lelang di ULP.

Secara umum pelaksanaan seluruh kegiatan fasilitasi pengembangan industri unggulan daerah tertinggal di Kabupaten Sukabumi dan Lebak berjalan lancar dan output yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan. Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah monitoring dan evaluasi fasilitasi bantuan alat yang telah diserahkan ke KUB.

b. Fasilitasi Pengembangan Industri Unggulan Daerah Tertinggal di Bondowoso dan Bangkalan

Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong percepatan pembangunan industri di daerah tertinggal di Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Bangkalan. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara swakelola dan pihak ketiga melalui koordinasi dengan daerah, diskusi, survey lapangan, pelatihan, pendampingan tenaga ahli dan peningkatan teknologi melalui bantuan mesin peralatan untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda. Kegiatan ini dilaksanakan dalam sub kegiatan yaitu:

- (1) Peningkatan kemampuan SDM di Kabupaten Bondowoso
- (2) Peningkatan Kemampuan SDM di Kabupaten Bangkalan
- (3) Fasilitasi Bantuan Mesin/Peralatan

Deskripsi masing-masing sub kegiatan dijabarkan sebagai berikut :

- (1).Peningkatan kemampuan SDM di Kabupaten Bondowoso bertujuan untuk meningkatkan kemampuan SDM industri meubel di Kabupaten Bondowoso dengan tujuan agar pelaku usaha dapat meningkatkan kualitas produk yang memiliki daya saing di pasar baik lokal, regional maupun internasional nantinya. Kegiatan ini dilakukan melalui pembelajaran teori dan praktek di kelas terhadap 20 peserta yang berasal dari industri meubel di Kabupaten Bondowoso selama 5 hari (40 JPL). Keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah dengan menghasilkan SDM yang bermutu dalam bidang desain, proses produksi, dan *finishing* industri meubel.
- (2).Peningkatan kemampuan SDM di Kabupaten Bangkalan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan SDM industri di bidang batik pewarnaan alam di Kabupaten Bangkalan dengan tujuan agar pelaku usaha dapat meningkatkan kualitas produk yang memiliki daya saing di pasar. Kegiatan ini dilaksanakan melalui pembelajaran teori dan praktek di kelas kepada 20 peserta yang berasal dari industri batik di Kabupaten Bangkalan selama 5 hari (40 JPL). Adapun output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah menghasilkan SDM yang bermutu dalam bidang pewarnaan alam di Kabupaten Bangkalan.
- (3).Fasilitasi bantuan mesin/peralatan yang diberikan yaitu mesin/peralatan industri meubel untuk KUB di Kabupaten Bondowoso serta mesin peralatan

industri batik pewarnaan alam untuk KUB di Kabupaten Bangkalan. Pelaksana kegiatan ini adalah pihak ketiga yang ditentukan melalui lelang di ULP.

Secara umum pelaksanaan kegiatan fasilitasi pengembangan industri unggulan daerah tertinggal di Kabupaten Bondowoso dan Bangkalan berjalan lancar dan output yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan. Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah monitoring dan evaluasi fasilitasi bantuan alat yang telah diserahkan ke KUB.

6. Forum Kegiatan/Koordinasi/Monev/Pembinaan Pengembangan Fasilitasi Industri di Daerah Wilayah II

Sesuai dengan Penetapan Kinerja, sasaran program/kegiatan yang akan dicapai Direktorat Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah II dalam rangka forum kegiatan/koordinasi/monev/pembinaan pengembangan fasilitasi industri di daerah wilayah II diukur melalui indikator kinerja utama tersusunnya program pengembangan industri daerah wilayah II dan terlayannya operasional perkantoran. Adapun realisasi, target serta capaian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 27. Capaian IKU dari Forum Kegiatan/Koordinasi/Monev/Pembinaan Pengembangan Fasilitasi Industri di Daerah Wilayah II

Sasaran Program/Kegiatan	IKU	2014			2015		
		T	R	Capaian (%)	T	R	Capaian (%)
Forum kegiatan/koordinasi/monev/pembinaan pengembangan fasilitasi industri di daerah wilayah II	Tersusunnya program pengembangan industri daerah wilayah II	-	-	-	4 dokumen	4 dokumen	100
	Terlayannya operasional perkantoran	-	-	-	12 bulan	12 bulan	100
	Terlaksananya penerapan budaya kerja 5K	-	-	-	1 satker	1 satker	100
Nilai Capaian Forum kegiatan/koordinasi/ monev/pembinaan pengembangan fasilitasi industri di daerah wilayah II							100

Tugas dan fungsi Direktorat Pengembangan Fasilitas Industri Wilayah II adalah melakukan penyiapan perumusan kebijakan industri, penyiapan norma, standart, prosedur dan kriteria industri, penyiapan bimbingan teknis dan evaluasi teknis industri dan pelaksanaan urusan tata usaha dan manajemen kinerja. Untuk mencapai tugas dan fungsi tersebut perlu di dukung oleh kegiatan penyusunan program , rencana kerja dan dokumen akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pada tahun 2015, Direktorat Pengembangan Fasilitas Industri Wilayah II melakukan beberapa kegiatan untuk mendukung hal tersebut, antara lain :

a. Koordinasi Penyusunan Program Pengembangan Industri Daerah Wilayah II

Kegiatan ini bertujuan untuk mensinergikan program pembinaan pengembangan perwilayahan industri dengan kondisi potensi dan kebutuhan daerah serta dengan instansi atau stakeholder terkait agar efektif dan efisien. Kegiatan ini dilaksanakan secara swakelola melalui koordinasi dan konsinyering penyusunan program, renkin, Tapkin dan Lakip serta rapat koordinasi dengan daerah-daerah sasaran pembinaan dan pengembangan industri wilayah Jawa dan Bali. Adapun output dari kegiatan ini adalah dokumen penyusunan program pengembangan industri wilayah II (4 dokumen) yaitu dokumen RAB dan TOR, Rencana Kinerja, Penetapan Kinerja (TAPKIN) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Kegiatan ini secara umum berjalan lancar dan rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah mengordinasikan kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2016.

b. Layanan Manajemen Kinerja

Kegiatan ini pada dasarnya merupakan dukungan penyelenggaraan administrasi operasional dan pemeliharaan sarana perkantoran agar peralatan perkantoran serta lingkungan kerja dapat menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari sehingga tercapai hasil kerja yang optimal, efektif dan efisien. Adapun target volume yang akan dicapai adalah 12 bulan layanan. Kegiatan ini dilakukan secara swakelola yang menyangkut penyelenggaraan administrasi operasional, pemeliharaan lingkungan kerja/5K dalam menunjang pelaksanaan tugas sehari-

hari serta partisipasi pada rapat/pertemuan lintas sektoral dan internal Kementerian Perindustrian.

Pada tahun 2015, Direktorat Pengembangan Fasilitas Industri Wilayah II telah mendapatkan grading hijau dalam penilaian budaya kerja 5K Kementerian Perindustrian. Hal ini meningkat dibanding tahun 2014 yang masih mendapatkan grading kuning. Kendala yang dihadapi dalam implementasi budaya kerja 5K adalah masih kurangnya kesadaran pribadi dari masing-masing pegawai/karyawan di lingkungan Direktorat Pengembangan Fasilitas Industri Wilayah II untuk menerapkan budaya kerja 5K dalam kehidupan sehari-hari serta kurangnya koordinasi dari Tim 5K yang telah dibentuk. Untuk itu perlu upaya perbaikan sistem berkelanjutan untuk menangani hal tersebut.

Kegiatan Layanan Manajemen Kinerja secara umum berjalan dengan baik dan lancar. Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan adalah meningkatkan pencapaian nilai yang lebih tinggi pada kegiatan 5K di tahun yang akan datang.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Anggaran DIPA yang disediakan untuk mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Pengembangan Fasilitas Industri Wilayah II Tahun 2015 sebesar Rp. 19.750.000.000,-. Sampai berakhirnya Tahun Anggaran 2015, anggaran DIPA yang terserap sebesar Rp. 17.229.624.005,- atau sebesar 87,24 %.

Sesuai dengan penetapan kinerja Dit. PFI Wilayah II untuk penyerapan anggaran di targetkan sebesar 95%, sedangkan realisasinya hanya mencapai 87,24%. Tidak tercapainya target realisasi anggaran dimaksud dikarenakan adanya efisiensi anggaran pada paket – paket lelang dan paket meeting di luar kantor serta ketidakcermatan dalam perencanaan kegiatan.

Realisasi DIPA sampai dengan 31 Desember 2015 berdasarkan program kerja dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 28
. Realisasi Anggaran Direktorat PFI Wilayah II Tahun 2015

Kode.	Program	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1852.001.011	Koordinasi Penyusunan Program Pengembangan Industri Daerah Wilayah II	192.603.000,-	182.978.100	95,00
1852.001.012	Layanan Manajemen Kinerja	275.680.000,-	259.280.468	94,05
1852.002.011	Penyusunan Masterplan Pengembangan Wppi Di Banten Dan Jawa Tengah	1.417.472.000,-	1.263.044.700	89,11
1852.002.012	Penyusunan Masterplan Pengembangan Wppi Di Jawa Barat Dan Jawa Timur	1.415.150.000,-	1.367.051.000	96,60
1852.003.011	Fasilitas Perencanaan Pembangunan Kawasan Industri Di Jawa (Banyuwangi Dan Majalengka) Dan Madura (Bangkalan)	2.912.264.000,-	2.693.029.690	92,47
1852.003.012	Fasilitas Pengembangan Kawasan Industri Di Jawa (Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur)	2.348.523.000,-	2.149.809.700	91,54
1852.005.011	Penyusunan Pola Pengembangan Sentra IKM di Jawa Tengah dan Jawa Timur	1.461.330.000,-	1.372.803.500	93,94
1852.005.012	Penyusunan Pola Pengembangan Sentra IKM di Jawa Barat	849.000.000,-	784.722.100	92,43
1852.005.013	Fasilitas Rencana Pembangunan Kawasan Industri Kecil/Sentra di Jawa Timur (refocusing)	1.387.886.000,-	0	0,00
1852.006.011	Fasilitas Penyusunan	397.000.000,-	374.102.500	94,23

Kode.	Program	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
	<i>Rencana Pengembangan Industri Provinsi di DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat</i>			
1852.006.012	<i>Fasilitasi Penyusunan Rencana Pengembangan Industri Provinsi di Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali</i>	525.880.000,-	503.993.275	95,84
1852.007.011	<i>Fasilitasi Pengembangan Industri Unggulan Daerah Tertinggal di Kabupaten Sukabumi dan Lebak</i>	1.902.910.000,-	1.851.768.714	97,32
1852.007.012	<i>Fasilitasi Pengembangan Industri Unggulan Daerah Tertinggal di Kabupaten Bondowoso dan Bangkalan</i>	1.950.910.000,-	1.911.743.208	97,99
1852.007.013	<i>Fasilitasi Penyusunan Rencana Pengembangan Industri Kabupaten di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur</i>	2.713.452.000,-	2.515.297.050	92,70
Total		19.750.000.000,-	17.229.624.005	87,24

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Direktorat Pengembangan Fasilitas Industri Wilayah II secara garis besar telah berhasil melaksanakan tugas pokok, fungsi dan misi yang diembannya dalam pencapaian sasaran strategis Direktorat Pengembangan Fasilitas Industri Wilayah II tahun 2015. Hal tersebut tercermin dari keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Direktorat Pengembangan Fasilitas Industri Wilayah II Tahun 2015. Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Belum seluruh sasaran strategis menunjukkan nilai capaian seperti yang diharapkan, karena itu perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut terhadap proses perencanaan program dan penganggaran dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
2. Realisasi penyerapan DIPA tahun anggaran 2015 secara keseluruhan sebesar 87,24% dari total pagu anggaran sebesar Rp 19.750.000.000,- atau senilai Rp 17.229.624.005,-;
3. Berdasarkan Pengukuran Kinerja yang dilaksanakan Direktorat Pengembangan Fasilitas Industri Wilayah II Perwilayahan Industri memberikan hasil rata-rata sebesar 106,36%. Persentase nilai tersebut dapat lebih besar dari realisasi keuangan dikarenakan ada beberapa kegiatan yang juga mendukung sasaran strategis sumber pembiayaannya tidak berasal dari Anggaran Direktorat PFI Wilayah II. Nilai tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan Direktorat Pengembangan Fasilitas Industri Wilayah II sudah baik dan cukup efisien karena outputnya tercapai sesuai dengan target;

B. Saran

1. Guna meningkatkan pencapaian kinerja yang berkelanjutan diperlukan koordinasi dan kerjasama antar berbagai pihak secara lebih intensif di masa yang akan datang, terutama sejak perencanaan untuk pemantapan program sampai dengan pelaksanaannya;
2. Diperlukan peningkatan disiplin dan tata kerja dari seluruh staf pelaksana Dit. PFI Wilayah II secara lebih profesional.

LAMPIRAN

PENGUKURAN KINERJA

PENGUKURAN KINERJA									
Unit Organisasi		: Direktorat Pengembangan Fasilitas Industri Wilayah II							
Tahun Anggaran		: 2015							
No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai Capaian	Output/Komponen/Sub Komponen	Anggaran		
							Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri di Wilayah Jawa dan Bali	a. Meningkatnya kontribusi nilai tambah sektor industri di Wilayah Jawa terhadap nilai tambah sektor industri nasional	72,27 %	71,03 %	98,28%	Pada dasarnya semua kegiatan Ditjen PPI mendukung tercapainya sasaran program/kegiatan ini	Rp. 19.750.000.000,-	Rp. 17.229.624.005,-	87,24%
		b. Meningkatnya kontribusi nilai tambah sektor industri di Wilayah Bali terhadap nilai tambah sektor industri nasional	0,55 %	0,40 %	72,73%				
		c. Meningkatnya unit usaha industri besar sedang di Wilayah Jawa terhadap total populasi industri besar sedang nasional	80,66 %	80,34 %	99,60%				
		d. Meningkatnya unit usaha industri besar sedang di Wilayah Bali terhadap total populasi industri besar sedang nasional	1,54 %	1,47 %	95,45%				
		e. Meningkatnya pertumbuhan sektor industri di Wilayah Jawa	6,97 %	5,87 %	84,22%				
		f. Meningkatnya pertumbuhan sektor industri di Wilayah Bali	7,80 %	8,88 %	113,85%				
		g. Meningkatnya kontribusi investasi sektor industri di Wilayah Jawa	68,91 %	69,52 %	100,89%				
		h. Meningkatnya kontribusi investasi sektor industri di Wilayah Bali	0,15 %	0,89 %	593,33%				
		i. Meningkatnya <i>share</i> sektor industri terhadap total PDRB di Wilayah Jawa	25,35 %	29,09 %	114,75%				
		j. Meningkatnya <i>share</i> sektor industri terhadap total PDRB di Wilayah Bali	8,85 %	6,38 %	72,09%				
					144,52%				

2	Tumbuh dan berkembangnya Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) di Wilayah Jawa dan Bali	Tersusunnya masterplan pengembangan WPPI	4 Prov.	4 Prov.	100,00%	Penyusunan masterplan pengembangan WPPI di Banten dan Jawa Tengah	Rp. 1.417.472.000,-	Rp. 1.263.044.700,-	89,11%
						Penyusunan masterplan pengembangan WPPI di Jawa Barat dan Jawa Timur	Rp. 1.415.150.000,-	Rp. 1.367.051.000,-	96,60%
Rata-Rata Nilai Capaian Kinerja					100,00%				
3	Tumbuh dan berkembangnya kawasan industri di Wilayah Jawa dan Bali	Terfasilitasinya kawasan industri dalam penyusunan kajian dan dokumen perencanaan pembangunan	2 KI	2 KI	100,00%	Fasilitasi perencanaan pembangunan kawasan industri di Jawa (Banyuwangi dan Majalengka) dan Madura (Bangkalan)	Rp. 2.912.264.000,-	Rp. 2.693.029.690,-	92,47%
						Fasilitasi Pengembangan Kawasan Industri di Jawa (Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur)	Rp. 2.348.523.000,-	Rp. 2.149.809.700,-	91,54%
Rata-Rata Nilai Capaian Kinerja					100,00%				
4	Tumbuhnya Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (SIKIM) di Wilayah Jawa dan Bali	Terfasilitasinya sentra IKM dalam penyusunan rencana pembangunan	3 SIKIM	3 SIKIM	100,00%	Penyusunan pola pengembangan sentra IKM di Jawa Tengah dan Jawa Timur	Rp. 1.416.330.000,-	Rp. 1.372.803.500,-	93,94%
						Penyusunan pola pengembangan sentra IKM di Jawa Barat	Rp. 849.000.000,-	Rp. 748.722.100,-	92,43%
						Fasilitasi rencana pembangunan kawasan industri kecil/sentra di Jawa Timur	Rp. 1.387.886.000,-	Rp. 0,-	0,00%
Rata-Rata Nilai Capaian Kinerja					100,00%				
5	Berkembangnya industri di daerah melalui penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi/Kabupaten/Kota di Wilayah Jawa dan Bali	Terfasilitasinya penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi/Kabupaten/Kota	16 daerah	16 daerah	100,00%	Fasilitasi penyusunan Rencana Pengembangan Industri provinsi di DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat	Rp. 397.000.000,-	Rp. 374.102.500,-	94,23%
						Fasilitasi penyusunan Rencana Pengembangan Industri provinsi di Jawa Tengah, D.I.Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali	Rp. 525.880.000,-	Rp. 503.993.275,-	95,84%
						Fasilitasi penyusunan Rencana Pengembangan Industri kabupaten di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur	Rp. 2.713.452.000,-	Rp. 2.515.297.000,-	92,70%
Rata-Rata Nilai Capaian Kinerja					100,00%				

6	Berkembangnya industri di daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik di Wilayah Jawa dan Bali	Terfasilitasinya industri di daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik	4 daerah	4 daerah	100,00%	Fasilitasi pengembangan industri unggulan daerah tertinggal di Kabupaten Sukabumi dan Lebak	Rp. 1.902.850.000,-	Rp. 1.851.768.714,-	97,32%
						Fasilitasi pengembangan industri unggulan daerah tertinggal di Bondowoso dan Bangkalan	Rp. 1.950.910.000,-	Rp. 1.911.743.208,-	97,99%
Rata-Rata Nilai Capaian Kinerja					100,00%				
7	Forum kegiatan/koordinasi/monev/pembinaan pengembangan fasilitas industri di daerah	Tersusunnya program pengembangan industri daerah wilayah II	4 dokumen	4 dokumen	100,00%	Koordinasi Penyusunan Program Pengembangan Industri Daerah Wilayah II	Rp. 192.603.000,-	Rp. 182.978.100,-	95,00%
		Terlayannya operasional perkantoran	12 bulan	12 bulan	100,00%	Layanan Manajemen Kinerja	Rp. 275.680.000,-	Rp. 259.280.468,-	94,05%
		Terlaksananya penerapan budaya kerja 5K	1 satker	1 satker	100,00%				
Rata-Rata Nilai Capaian Kinerja					100,00%				
Rata-Rata Nilai Capaian Kinerja					106,36%	Persentase Realisasi Anggaran			86,18%
Jumlah Anggaran		: Rp 19.750.000.000,- (Sembilan belas milyar tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)							
Jumlah Realisasi Anggaran		: Rp 17.229.624.005,- (Tujuh belas milyar dua ratus dua puluh sembilan juta enam ratus dua puluh empat ribu lima rupiah)							

**DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN INDUSTRI**

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53 Lantai 13 Jakarta 12950 Kotak Pos : 3538 JKSMG
Telp. (021) 526 1711, Fax. (021) 526 1711

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Budhi Setyanto

Jabatan : Direktur Pengembangan Fasilitas Industri Wilayah II

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Imam Haryono

Jabatan : Direktur Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 Januari 2015

Pihak Kedua

Imam Haryono

Pihak Pertama

Budhi Setyanto

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
DIREKTORAT PENGEMBANGAN FASILITASI INDUSTRI WILAYAH II

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri di Wilayah Jawa dan Bali	Meningkatnya kontribusi nilai tambah sektor industri di Wilayah Jawa terhadap nilai tambah sektor industri nasional Meningkatnya kontribusi nilai tambah sektor industri di Wilayah Bali terhadap nilai tambah sektor industri nasional Meningkatnya unit usaha industri besar sedang di Wilayah Jawa terhadap total populasi industri besar sedang nasional Meningkatnya unit usaha industri besar sedang di Wilayah Bali terhadap total populasi industri besar sedang nasional Meningkatnya pertumbuhan sektor industri di Wilayah Jawa Meningkatnya pertumbuhan sektor industri di Wilayah Bali Meningkatnya kontribusi investasi sektor industri di Wilayah Jawa Meningkatnya kontribusi investasi sektor industri di Wilayah Bali Meningkatnya <i>share</i> sektor industri terhadap total PDRB di Wilayah Jawa Meningkatnya <i>share</i> sektor industri terhadap total PDRB di Wilayah Bali	72.27% 0.55% 80.66% 1.54% 6.97% 7.80% 68.91% 0.15% 25.35% 8.85%
2	Tumbuh dan berkembangnya Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) di wilayah Jawa dan Bali	Tersusunnya masterplan pengembangan WPPI	4 dokumen
3	Tumbuh dan berkembangnya kawasan industri di Wilayah Jawa dan Bali	Terfasilitasinya kawasan industri dalam penyusunan kajian dan dokumen perencanaan pembangunan	2 kawasan industri
4	Tumbuhnya Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (SIKIM) di Wilayah Jawa dan Bali	Terfasilitasinya sentra IKM dalam penyusunan rencana pembangunan	3 SIKIM
5	Berkembangnya industri di daerah melalui penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi/Kabupaten/Kota di Wilayah Jawa dan Bali	Terfasilitasinya penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi/Kabupaten/Kota	16 daerah
6	Berkembangnya industri di daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik di Wilayah Jawa dan Bali	Terfasilitasinya industri di daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik	4 daerah

Kegiatan	Anggaran
1. Forum Kegiatan/Koordinasi/Monev/Pembinaan Pengembangan Fasilitasi Industri di Daerah Wilayah II	Rp 750.000.000,00
2. Fasilitasi Pengembangan WPPI di Wilayah II	Rp 3.000.000.000,00
3. Fasilitasi Pengembangan Kawasan Industri di Wilayah II	Rp 5.600.000.000,00
4. Fasilitasi Pengembangan Sentra IKM di Wilayah II	Rp 2.400.000.000,00
5. Fasilitasi Pengembangan Industri Unggulan Daerah di Wilayah II	Rp 1.100.000.000,00
6. Fasilitasi Pengembangan Industri di Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca Konflik	Rp 6.900.000.000,00
	Rp 19.750.000.000,00

Jakarta, 30 Januari 2015

Direktur Jenderal,



Imam Haryono

Direktur Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah II,



Budhi Setyanto